



PROSEDUR ADMINISTRASI PENAGIHAN PIUTANG REKENING LISTRIK  
PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER

PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)

Program Diploma III Administrasi Keuangan

Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

Novelia Kristiani

NIM 120803102015

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015



PROCEDURE OF ADMINISTRATION RECEIVABLE ELECTRICITY BILL  
FOR PT. PLN PERSERO FOR JEMBER NETWORK AND SERVICES

THE REAL WORK PRACTICAL

Composed that one of rule for acquiring Ahli Madya title ( A.Md.)

Study Program Diploma III Financial Administration

Economy of Faculty Jember University

By :

Novelia Kristiani

NIM 120803102015

STUDY PROGRAM DIPLOMA III FINANCIAL ADMINISTRATION

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

ECONOMY OF FACULTY

JEMBER UNIVERSITY

2015



PROSEDUR ADMINISTRASI PENAGIHAN PIUTANG REKENING LISTRIK  
PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER

PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)

Program Diploma III Administrasi Keuangan

Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

Novelia Kristiani

NIM 120803102015

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

LEMBAR PERSETUJUAN  
PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : NOVELIA KRISTIANI  
NIM : 120803102015  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI KEUANGAN  
JUDUL LAPORAN : PROSEDUR ADMINISTRASI PENAGIHAN  
PIUTANG REKENING LISTRIK PADA PT. PLN  
(PERSERO) UNIT PELAYANAN DAN  
JARINGAN JEMBER KOTA

---

Jember, Maret 2015

Laporan Praktek Kerja Nyata

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Drs. Adi Prasajo, MP.

NIP. 19950516 198703 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Administrasi Keuangan

Dra. Susanti P., M.Si

NIP. 19660918 199203 2 002

**JUDUL**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROSEDUR ADMINISTRASI PENAGIHAN PIUTANG**  
**REKENING LISTRIK PADA PT. PLN (PERSERO)**  
**UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER**

Yang disusun oleh :

Nama : NOVELIA KRISTIANI

NIM : 120803102015

Jurusan : Manajemen

Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

**28 April 2015**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Tatok Endhiarto, SE, M.Si  
NIP 19600404 198902 1 001

Drs. Marmono Singgih, MSi  
NIP 19660904 199002 1 001

Anggota,

Ana Mufida, SE, M.Si  
NIP 19800201 200501 2 001

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan

4 x 6

Dr. Moehammad Fathorrozi, SE, M.Si  
NIP 19630614 199002 1 001

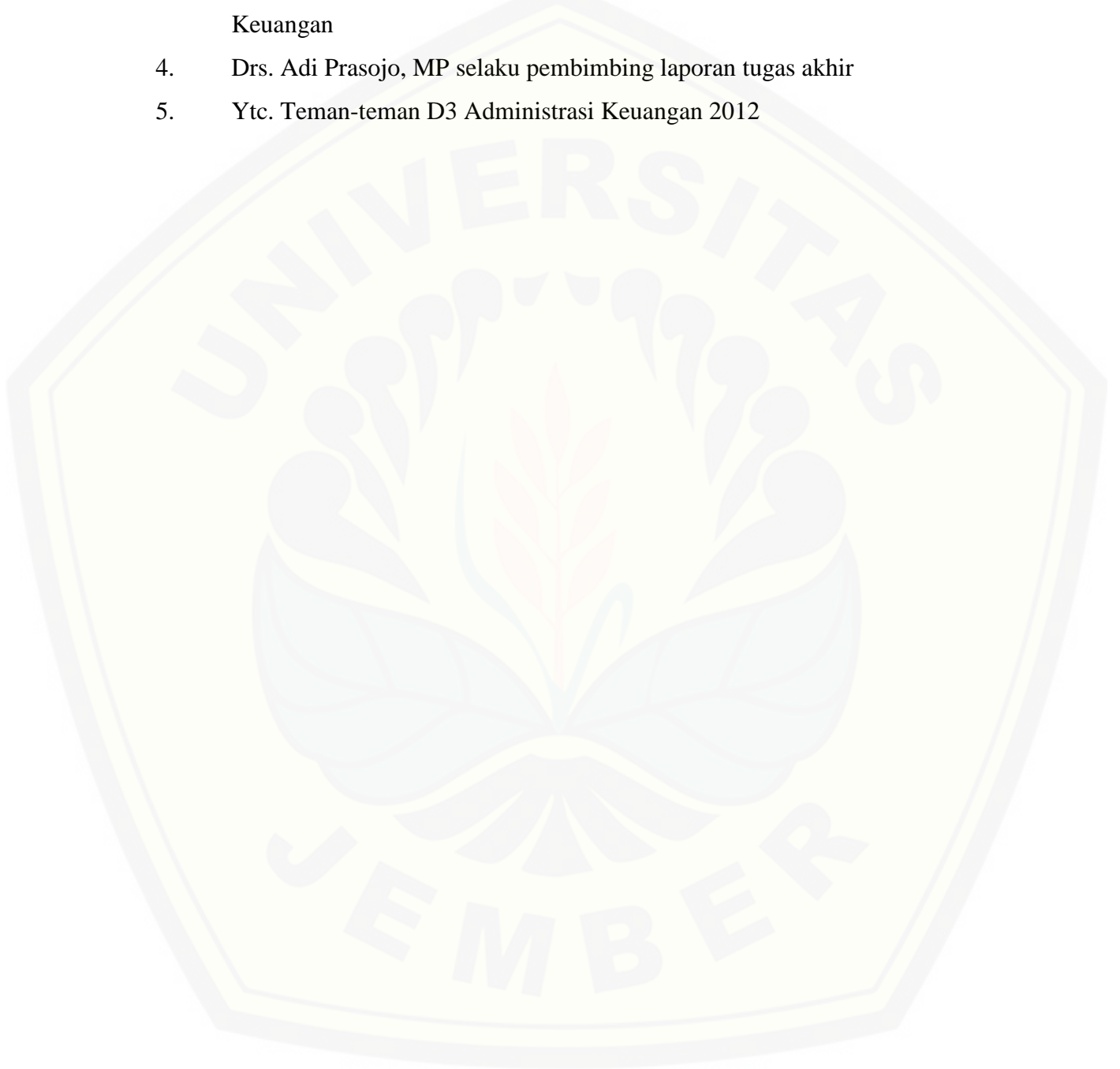
**MOTTO**

***Begitu banyak  
permasalahn yang  
ada di dalam hidup kita,  
namun  
ingatlah Tuhan tidak  
akan  
memberikan semuanya  
itu melebihi  
kemampuan kita.***

***Sebab apa yang kamu tabur itulah yang di tuai  
(Novelia Kristiani)***

**Laporan Praktek Kerja Nyata ini penyusun persembahkan kepada:**

1. Untuk Mama dan Papa tersayang
2. Kakak Amelia Kresnawati, S.E dan Wenilia Kristiana adik tersayang
3. Dra. Susanti P., M.Si selaku kepala program studi D3 Administrasi Keuangan
4. Drs. Adi Prasajo, MP selaku pembimbing laporan tugas akhir
5. Ytc. Teman-teman D3 Administrasi Keuangan 2012



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya yang berlimpah yang telah memberi kekuatan dan kesabaran sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini yang berjudul Prosedur Administrasi Penagihan Piutang Rekening Listrik pada PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember Kota, diajukan untuk Memenuhi Syarat Akademik Program Studi D3 Administrasi Keuangan

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

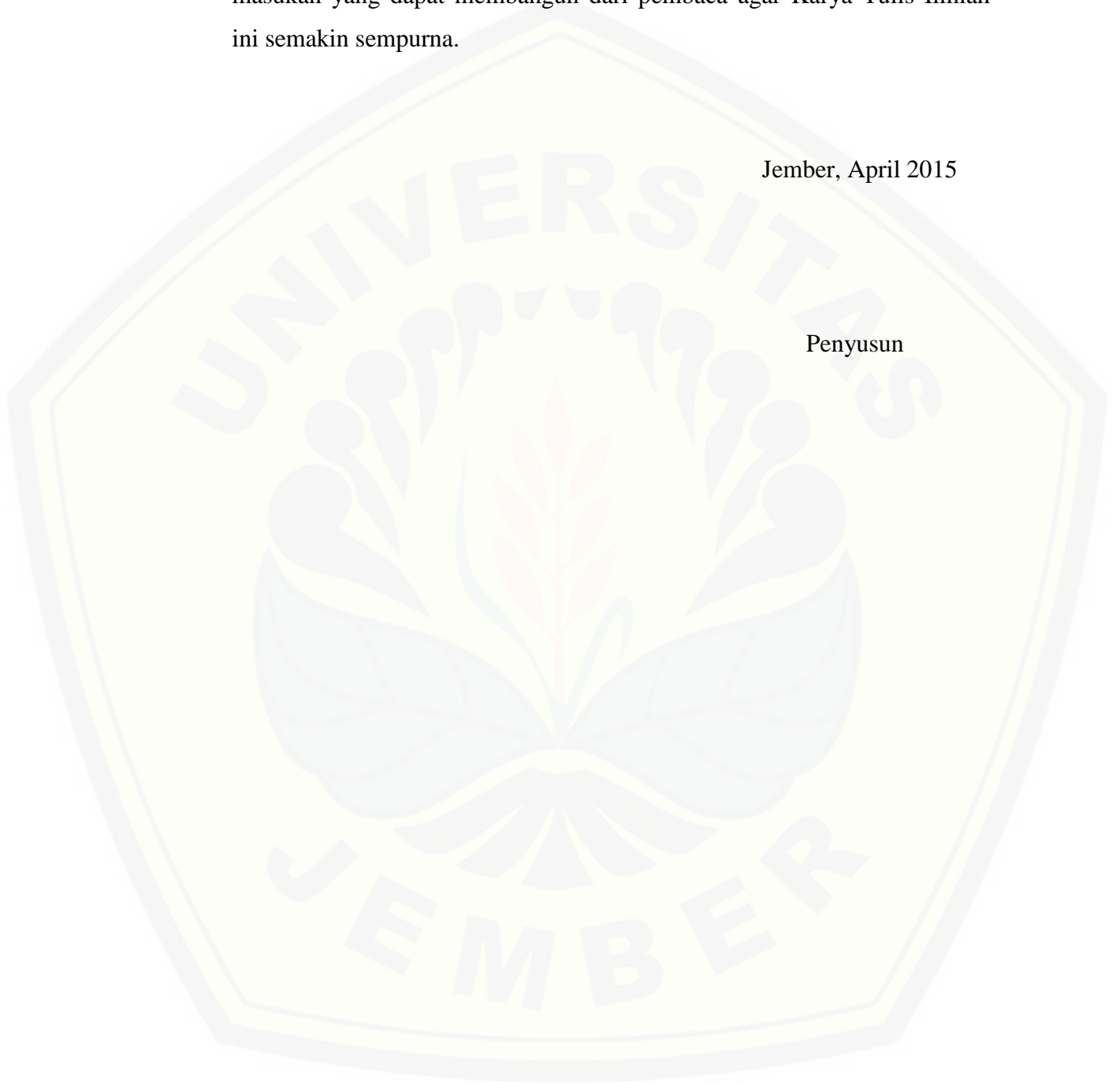
1. Bapak Dr. M. Fathorrozi, SE, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Ristu Eka Sasmita Kepala Unit Pelayanan dan Jaringan PT. PLN Jember Kota.
3. Bapak Drs. Adi Prasajo, MP Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, dengan sepenuh hati dan kesabaran serta ketekunannya memberikan nasihat dan masukan untuk menyempurnakan Laporan Praktek Kerja Nyata
4. Keluarga Sugihartono, orang tua dari penyusun yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan penyusun untuk menggunakan waktu seefisien mungkin.
5. Kakak Amelia Krisnawati S.E dan adik Wenilia Kristiana yang sudah banyak mendukung dan memberi semangat
6. Andri Susilo terimakasih sudah mendampingi selama ini dan banyak memberikan dukungan
7. Teman-teman D3 Admimistrasi Keuangan 2012 yang saling memberi dorongan dan dukungan data-data hingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini selesai tepat waktu.



Penyusun menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan masukan yang dapat membangun dari pembaca agar Karya Tulis Ilmiah ini semakin sempurna.

Jember, April 2015

Penyusun



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

**BAB I: PENDAHULUAN**

1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata	
1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata	
1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata.....	5
1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	6

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Prosedur.....	7
2.2 Pengertian Administrasi.....	7
2.2.1 Unsur – unsur Administrasi	
2.3 Pengertian Tagihan.....	9
2.4 Pengertian Piutang.....	10
2.5 Cadangan Kerugian Piutang.....	10
2.6 Penilaian Piutang.....	12
2.7 Metode Pencatatan Piutang.....	12

2.8 Penghapusan Piutang.....	15
2.9 Metode Penghapusan Langsung.....	15
2.10 Pengertian Tata Usaha Pelanggan (TUL).....	16

## BAB III: METODE PENELITIAN

3.1 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (Persero).....	17
3.2 Visi Misi PT. PLN (Persero).....	20
3.3 Struktur Organisasi.....	20
3.4 Kegiatan Pokok Perusahaan.....	25
3.5 Kegiatan Fungsi Penagihan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember.....	26

## BAB IV: PEMBAHASAN MASALAH

4.1 Alur Prosedur Administrasi Penagihan Piutang Rekening Listrik.....	28
4.1.1 Perencanaan Penagihan Rekening Listrik.....	30
4.1.2 Persiapan Penagihan Rekening Listrik.....	30
4.1.3 Pelaksanaan Penagihan Piutang Rekening Listrik.....	33
4.2 Kegiatan Lain Praktek Kerja Nyata (PKN)	
4.2.1 Pembuatan Rekap Tagihan Pelanggan Tunggakan.....	37
4.2.2 Pembuatan Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan.....	38
4.2.3 Perhitungan Rekening Listrik.....	42
4.2.4 Menggolongkan Rekening Listrik.....	43

## BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	52
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	54
---------------------	----

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Alasan Pemilihan Judul**

Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang secara terus menerus akan membawa peningkatan kearah yang lebih baik. Karena setiap warga negara harus ikut serta melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan serta demi tercapainya pembangunan nasional.

Pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia, diantaranya pembangunan ekonomi, kebutuhan akan penyalahgunaan sumber energi listrik bertambah banyak. Hal ini memberikan peluang kepada pemerintah atau perusahaan swasta untuk mengembangkan penyediaan listrik yang dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara (persero). Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah lama berdiri dan merupakan perusahaan terbesar di Indonesia. Selain itu PT. PLN (Persero), sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik dan merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh dan tetap bertahan di Indonesia, sehingga PT. PLN (Persero) dapat dipastikan telah memiliki sistem manajemen yang baik dan layak untuk dipelajari.

PT. PLN (Persero) merupakan penyedia jasa listrik yang selalu berhubungan erat dengan masyarakat, karena merupakan produk yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk keperluan sehari – hari. PT.PLN (Persero) yang bergerak di bidang jasa didalamnya terdapat alur kegiatan dan penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam hal penerimaan kas, terdapat sumber penerimaan yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Sedangkan untuk pengeluaran kas dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan menggunakan cek dan uang tunai (Mulyadi, 2001 : 455). Salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kepada publik adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN)

mempunyai tugas sebagai pengelola transmisi, operasi sistem dan transaksi tenaga listrik dengan kualitas pelayanan setara kelas dunia, yang mampu memenuhi harapan stakeholder, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu PLN harus mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dari pelosok desa hingga ke kota besar. Pelayanan merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Upaya yang dilakukan PT. PLN (Persero) agar memberikan layanan konsumen yang memuaskan pelanggannya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Bank, Kantor Pos, PPOB yang ada. Kerjasama ini berupa bentuk pelayanan kepada masyarakat adalah Payment Point Online Bank (PPOB).

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah suatu loket penerimaan (payment point) pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PLN yang langsung online dengan bank. Payment Point Online Bank (PPOB) mulai efektif difungsikan untuk melayani pelanggan sejak bulan Mei 2009 hingga sekarang. Maksud dan tujuan dibuka pelayanan ini adalah perubahan pola proses bisnis PLN agar efisien, tetapi mengedepankan kemudahan bagi pelanggan serta persaingan yang sehat diantara penyedia jasa pembayaran rekening listrik. Diharapkan dengan adanya sistem Payment Point Online Bank (PPOB) ini, pelanggan mudah membayar listrik, bisa dimana saja, kapan saja dan cara apa saja sehingga hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction).

Undang-undang No.15 Tahun 1985 menjelaskan tentang maksud dan tujuan didirikan Perusahaan Listrik Negara adalah mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pembangunan penyediaan tenaga listrik di sektor swasta. PT. PLN bukan sekedar penyedia energi akan tapi juga berkontribusi pada pengembangan masyarakat produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, tidak sekedar dijalankan untuk mengejar efisiensi melainkan juga untuk memungkinkan terjadinya kerjasama perusahaan secara berkesinambungan, dalam penyelenggaraan bisnis secara etika yang sesuai dengan Prinsip Ekonomi yang

dilaksanakan untuk berkembangnya perusahaan melalui peningkatan kinerja dan produktivitas secara berkelanjutan. PT. PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan milik negara yang bertugas melayani masyarakat dengan kebutuhan vitalnya yaitu listrik, pada dasarnya dituntut untuk memenuhi 3 (Tiga) kriteria berikut :

1. Harus mengutamakan peningkatan produksi sehingga mendekati kapasitas produksi perusahaan.
2. Memperbesar efisiensi dan meniadakan biaya yang secara ekonomis tidak diperlukan oleh perusahaan.
3. Menghasilkan keuntungan untuk dapat memenuhi modal dan kewajibannya pada pemerintah.

Oleh karena itu selain memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, juga harus meningkatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan pembangunan khususnya di daerah. Untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan tersebut maka perlu adanya prosedur penagihan yang efektif dan efisien sehingga memudahkan pemakai jasa PT. PLN (Persero) untuk membayar dan memperlancar tugas penagihan oleh petugas PLN.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengamati prosedur pembayaran rekening listrik di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur unit pelayanan dan jaringan Jember, hasil pengamatan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian yang berjudul “PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN PENAGIHAN PIUTANG REKENING LISTRIK PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER”.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan praktek kerja nyata, meliputi:

- a. Mengetahui dan memahami mengenai Prosedur Administrasi Penagihan Piutang Rekening Listrik pada PT. PLN (PERSERO) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember.

- b. Untuk mendapatkan pengalaman praktis (membantu pelaksanaan administrasi) Prosedur Penagihan Piutang Rekening Listrik pada PT. PLN (PERSERO) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember.

## 1.2.1 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Beberapa kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan praktek kerja nyata, meliputi:

- a. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktis/kerja yang berhubungan dengan Proses Administrasi Keuangan Penagihan Piutang Rekening Listrik pada PT. PLN (PERSERO) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember.
- b. Guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Tugas Akhir D3 Administrasi Keuangan.

## 1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

### 1.3.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Jember yang beralamat di Jalan PB.SudirmanNo. 24 Jember  
Telepon : 0331 – 410123, 0331 – 411123.

## 1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dilaksanakan selama kurang lebih 144 jam terhitung pada tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 23 Maret 2015. Adapun waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember yaitu sebagai berikut:

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 16.00	12.00 – 13.00
Jum'at	07.00 – 16.00	11.00 – 13.00
Sabtu (Libur)	-	-

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember.

## 1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Adapun bidang ilmu yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Perkreditan
2. Akuntansi
3. Pengantar Manajemen
4. Referensi dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) PERSERO Unit Pelayanan dan Jaringan Jember.



## 1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata dengan perencanaan waktu sebagai berikut:

TABEL JADWAL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA PT. PLN

No	KETERANGAN	MINGGU				Jumlah Jam
		I	II	III	IV	
1.	Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember	X				4
2.	Pengenalan ruang lingkup dan struktur organisasi	X				4
3.	Menerima penjelasan tentang gambaran umum dan pelaksanaan operasional PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Jember	X	X			7
4.	Melaksanakan tugas yang diberikan.		X	X	X	89
5.	Mencatat dan mengumpulkan data yang diperoleh untuk menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata		X	X	X	15
6.	Mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan		X	X	X	20
7.	Menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata			X	X	5
	Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata					144

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan antara satu sama lain yang menunjukkan urutan-urutan cara yang harus dikerjakan dalam rangka menyelesaikan suatu bidang pekerjaan.

Pengertian lain dari prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan kerani (Kontinue/rutin) yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi (Zaki Baridwan,1994:3).

Menurut Amin Widjaja (1995:83) Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan.

#### 2.2 Pengertian Administrasi

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat – mencatat, surat – menyurat, pembukuan ringan ketik – mengetik agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Sondang P. Siagian (1992:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2.2.1 Unsur – unsur Administrasi

Unsur administrasi adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam keseluruhan kegiatan administrasi. Berikut ini merupakan unsur – unsur administrasi, yaitu :

A. Unsur yang mutlak yang mana harus ada dari administrasi, jika unsur itu tidak ada maka tidak akan ada administrasi. Unsur mutlak yang merupakan faktor penyebab administrasi seperti klasifikasi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian ada 4 unsur yaitu:

### 1.) Dua orang manusia atau lebih

Dua orang manusia atau lebih tergolong sebagai unsur mutlak administrasi dengan asumsi bahwa manusia tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri tetapi memerlukan bantuan dan pertolongan dari orang lain.

### 2.) Tujuan

Tujuan adalah nilai-nilai atau kebutuhan manusia, baik jasmaniah maupun rohaniah yang diperjuangkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata agar nilai kebutuhan itu dapat terpenuhi. Tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh hanya sebagian dan mungkin pula malah hanya oleh seorang dari mereka yang terlibat. Tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang ingin bekerja sama umumnya ada tiga macam, yaitu :

a. Tujuan jangka panjang

b. Tujuan jangka menengah (sedang), yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang lebih singkat di bandingkan dengan tujuan jangka panjang

c. Tujuan jangka pendek, yaitu tujuan yang relatif singkat di bandingkan dengan tujuan jangka menengah/sedang.

### 3.) Tugas yang hendak dilaksanakan

Berbicara mengenai tugas yang hendak dilaksanakan, sering pula orang beranggapan bahwa proses administrasi baru timbul apabila ada kerja sama. Tidak demikian halnya jika diterima pendapat bahwa unsur merupakan bagian yang mutlak dari sesuatu, akan segera terlihat bahwa kerja sama bukan merupakan unsur administrasi, melainkan suatu kondisi ideal. Artinya, perlu ditekankan bahwa pencapaian tujuan akan lebih

efisien dan ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerja satu sama lain. Akan tetapi tanpa kerja sama pun, misalnya dalam hal penyelesaian tugas yang dipaksakan, proses administrasi pun terjadi.

#### 4.) Peralatan dan perlengkapan/ Sarana dan prasarana

Peralatan dan perlengkapan yang di perlukan dalam suatu proses administrasi bergantung berbagai faktor:

- a.) Jumlah orang yang terlibat dalam proses itu.
- b.) Sifat tujuan yang hendak dicapai.
- c.) Ruang lingkup dan aneka ragam tugas yang hendak dijalankan.
- d.) Sifat kerja sama yang dapat diciptakan dan di kembangkan.

B. Unsur yang bersifat umum, yaitu jika tidak adanya unsur itu bukan berarti administrasi tidak ada, tetapi hanya kurang sempurna. Unsur umum yang terdapat di dalam rangkaian kegiatan penataan yang dinamakan administrasi menurut The Liang Gie, ada 8 macam yang merupakan subkonsep administrasi, yaitu :

- a.) Organisasi,
- b.) Manajemen,
- c.) komunikasi,
- d.) informasi,
- e.) personalia,
- f.) finansia,
- g.) materia,
- h.) relasi publik.

### **2.3 Pengertian Tagihan**

Penjualan barang – barang dan jasa – jasa dari perusahaan pada saat ini banyak dilakukan dengan kredit sehingga ada tenggang waktu sejak penyerahan barang atau jasa sampai saat diterimanya uang. Dalam tenggang waktu tersebut penjual mempunyai tagihan kepada pembeli. Tagihan dapat juga timbul dari berbagai kegiatan lain seperti memberi pinjaman kepada karyawan, memberi uang muka pada perusahaan atau penjualan aktiva tetap yang sudah tidak digunakan dalam perusahaan. Istilah tagihan disini dimaksudkan dengan klaim perusahaan atas uang (Zaki Baridwan, 1994:123).

## 2.4 Pengertian Piutang

Piutang menurut Sudarsono (1997:62) yaitu semua tagihan kepada seseorang atau badan usaha atau kepada pihak lainnya dalam satuan uang, yang timbul dari transaksi masa lalu. Piutang merupakan perkiraan yang penting karena hampir semua perusahaan pasti mempunyai perkiraan ini. Transaksi yang paling umum terjadi adalah akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang ini diharapkan dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dan dalam kelompok neraca merupakan bagian dari aktiva tetap.

Piutang dapat diklasifikasikan sebagai piutang usaha atau piutang non usaha. Piutang usaha yaitu piutang yang terjadi dari usaha pokok perusahaan, misalnya piutang dagang dan piutang jasa. Sedangkan piutang non usaha, yaitu piutang yang terjadi selain dari usaha pokok perusahaan, misalnya piutang kepada karyawan, uang muka ke kantor cabang dan piutang bunga.

Zaki Baridwan (1994:124) menyatakan bahwa piutang dagang (piutang usaha) adalah piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan yang normal, biasanya piutang dagang dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga dikelompokkan dalam aktiva lancar. Yang termasuk dalam piutang ini hanya tagihan-tagihan yang akan dilunasi dengan uang, oleh karena itu pengiriman barang untuk (konsinyasi) tidak dicatat sebagai piutang sampai saat dimana barang-barang tadi sudah dijual.

Soemarso S.R (1992:365) menyatakan bahwa piutang adalah merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada langganan – langganannya pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan, biasanya dalam bentuk memperbolehkan langganan membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Penjualan dengan syarat tersebut disebut penjualan kredit.

## 2.5 Cadangan Kerugian Piutang

Dalam metode cadangan, setiap akhir periode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang yang akan dibebankan ke periode yang bersangkutan. Ada 2

(Dua) dasar yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah kerugian piutang (Zaki Baridwan,1992:126-129),yaitu :

## 1. Jumlah Penjualan

Apabila kerugian piutang itu dihubungkan dengan proses pengukuran laba yang diteliti, maka dasar perhitungan kerugian piutang dalah jumlah penjualan (Pendekatan pendapatan-biaya).

## 2. Saldo Piutang

Apabila saldo piutang sebagai dasar perhitungan kerugian piutang, maka arahnya adalah menilai aktiva dengan teliti (Pendekatan aktiva-utang). Penggunaan masing-masing dasar akan dijelaskan sebagai berikut :

### a. Kerugian piutang dihitung atas dasar jumlah penjualan

Kerugian piutang dihitung dengan cara mengalikan persentase tertentu dengan jumlah penjualan tersebut. Persentase kerugian piutang dihitung dari perbandingan yang dihapus dengan jumlah penjualan tahun-tahun lalu, kemudian disesuaikan dengan keadaan tahun yang bersangkutan.Kerugian piutang itu timbul karena adanya penjualan kredit.Oleh karena itu kerugian piutang juga dihitung dari penjualan kredit.Taksiran kerugian piutang ini dibebankan ke rekening kerugian piutang dan kreditnya adalah rekening cadangan kerugian piutang.

### b. Kerugian piutang dihitung atas dasar saldo piutang

Perhitungan kerugian piutang atas dasar saldo piutang, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

#### 1.) Jumlah cadangan dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang.

Dalam cara ini, saldo piutang dilakukan dengan persentase tertentu, hasilnya merupakan saldo rekening cadangan kerugian piutang yang diinginkan. Untuk menghitungnya, hasil perhitungan tersebut dikurangi atau ditambah dengan saldo rekening cadangan kerugian piutang.

#### 2.) Cadangan ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang

Dalam cara ini, hasil persentase kerugian piutang dengan saldo piutang merupakan jumlah yang dicatat sebagai kerugian piutang dan dikreditkan ke 8 rekening cadangan kerugian piutang tanpa memperhatikan saldo rekening cadangan kerugian piutang.

- 3.) Jumlah cadangan dinaikkan sampai suatu jumlah yang dihitung dengan menganalisa umur piutang. Metode ini disebut metode analisa umur piutang. Piutang masing –masing langganan dibagi dalam dua kelompok, yaitu belum menunggak dan menunggak. Yang dimaksud menunggak adalah sudah melebihi jangka waktu kredit. Jumlah kerugian piutang dihitung dengan cara ini sesudah mempertimbangkan saldo rekening cadangan kerugian piutang merupakan jumlah kerugian piutang.

## 2.6 Penilaian Piutang

Dalam hubungannya dengan piutang, dalam buku Prinsip akuntansi Indonesia disebutkan bahwa piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Dari prinsip diatas dapat diketahui bahwa untuk melaporkan piutang dalam neraca adalah sebesar jumlah yang akan direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Walaupun piutang telah dinilai sebesar jumlahnya (setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih) namun biasanya kedua jumlah tersebut tetap disajikan. Dengan cara ini pihak yang berkepentingan dapat mengetahui jumlah bruto dan penyisihan yang dibuat untuk piutang tidak tertagih.

Perkiraan penyisihan piutang tidak tertagih merupakan perkiraan kontra (contra account). Walaupun saldo normal perkiraan ini adalah kredit tetapi disajikan sebagai pengurangan atas perkiraan aktiva yang bersangkutan. Di neraca piutang usaha disajikan secara terpisah dengan piutang non usaha atau pihak lain.

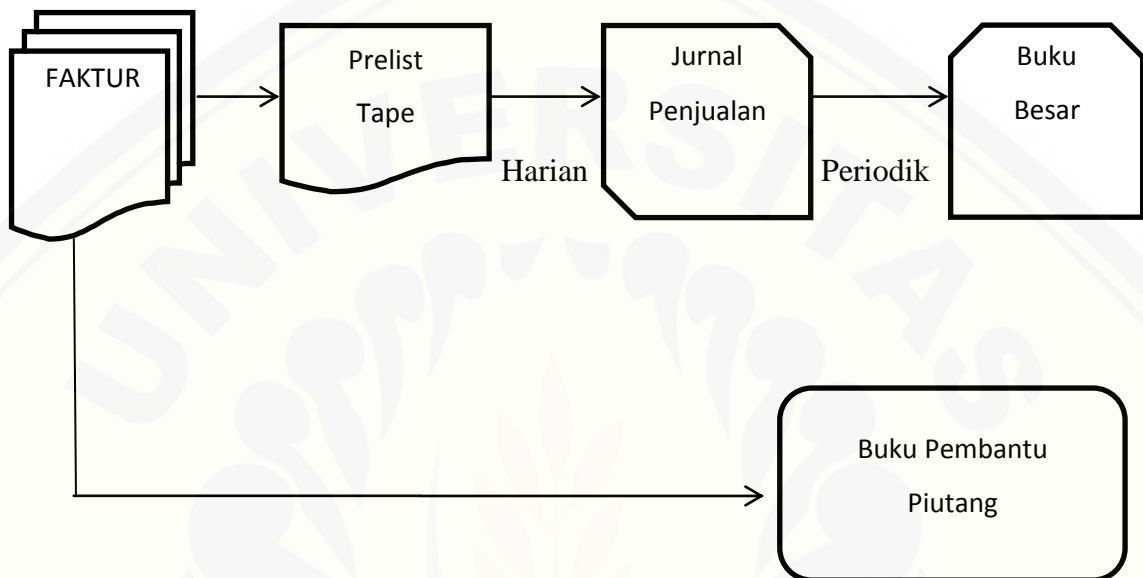
## 2.7 Metode Pencatatan Piutang

Untuk pencatatan piutang, dapat digunakan 3 (tiga) cara mengerjakan jurnal dan posting (Zaki Baridwan,1994:150-155) meliputi :

### 1. Metode Tangan (*Pen and Ink Method*)

Dalam metode ini posting ke buku pembantu piutang dilakukan dari buku jurnal dan buku jurnal penerimaan kas. Penerimaan kas adalah jumlah total seluruh bukti yang diposting pada hari itu. Jumlah total ini diperoleh dari prelist tape atau batch total. Urut-urutan metode tangan dan postingnya sebagai berikut : Faktur-faktur dari bagian billing diterima oleh bagian piutang bersama

dengan prelist tape. Faktur ini diposting ke buku pembantu piutang dengan cara disortir dulu atau secara random. Jumlah dalam prelist tape dicatat dalam jurnal penjualan, sehingga setiap hari hanya ada satu jurnal. Bila sehari dilakukan beberapa kali posting, maka berarti akan terdapat beberapa jurnal. Prosedur seperti ini bila digambarkan akan nampak sebagai berikut :



Gambar 1 : Metode Tangan Untuk Mencatat Piutang, Jurnal Hanya Menunjukkan Total Harian.

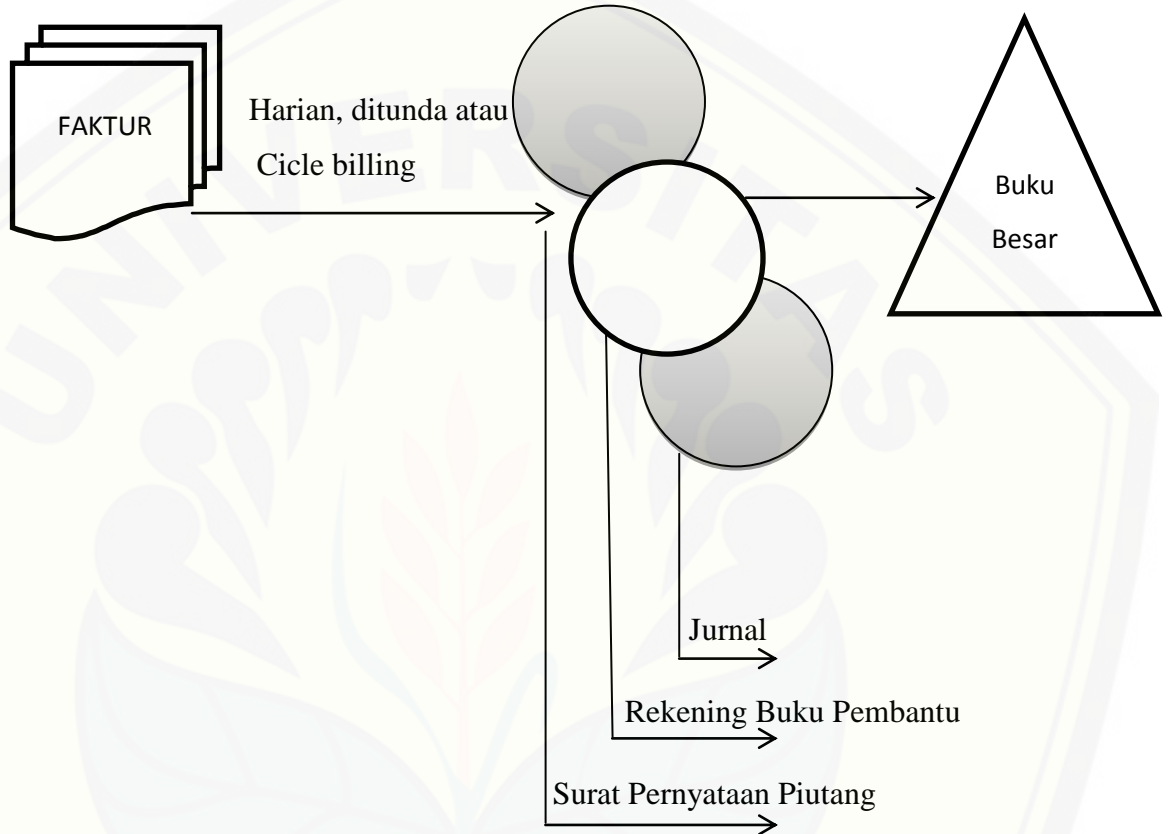
## 2. Metode Posting Langsung (*Direct posting*)

Apabila pencatatan piutang menggunakan posting langsung, maka pekerjaan membuat surat pernyataan piutang dapat digabungkan sekaligus dengan posting ke buku pembantu. Surat pernyataan piutang yang sesuai dikerjakan bersama dengan posting ke buku pembantu piutang adalah bentuk surat pernyataan tunggal dan bentuk saldo berjalan dengan rekening konvensional. Dalam cara ini faktur yang diterima diposting ke buku pembantu piutang dan surat pernyataan piutang. Dapat juga dibuat tembusan ketiga yang berfungsi sebagai jurnal. Posting langsung seperti ini dapat dilakukan setiap hari atau setiap periode.



Jika posting dilakukan setiap hari maka faktur yang diterima setiap harinya diposting ke surat pernyataan dan buku pembantu piutang. Faktur ini dapat disortir dulu baru diposting atau dapat juga diposting secara random.

Prosedur seperti ini bila digambarkan akan nampak sebagai berikut :



Gambar 2 : (Posting Langsung Ke Surat Pernyataan Piutang dan Buku Pembantu Piutang)

### 3. Metode Tanpa Buku Pembantu (*Ledgerless Bookkeeping*)

Pencatatan piutang dengan menggunakan metode tanpa buku pembantu dilakukan dengan menyimpan faktur penjualan sesuai dengan nama langganan. Dalam metode ini tidak digunakan buku pembantu piutang sehingga tidak ada FAKTUR Buku Besar pekerjaan posting ke buku pembantu. Apabila terjadi pelunasan piutang, ada 2 cara yang dapat digunakan sebagai berikut :

- a. Apabila pelunasan piutang ini tidak sejumlah fakturnya, maka bukti penerimaan uang disimpan bersama dengan faktur truant yang baru dibayar sebagian. Jumlah yang sudah dilunasi dituliskan dalam faktur dan dituliskan dalam saldo akhirnya.
- b. apabila jumlah dalam faktur sudah dibayar semua, faktur tadi diambil dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke tempat faktur-faktur yang sudah dilunasi. Apabila digunakan metode tanpa buku pembantu, maka surat pernyataan piutang yang dapat dibuat adalah yang bentuknya sederhana seperti saldo akhir bulan.

### 2.8 Penghapusan Piutang

Piutang yang tidak dapat ditagih karena debitemnya lari, meninggal, bangkrut atau sebab-sebab lain harus dihapuskan dari rekening piutang. Penghapusan piutang ini merupakan suatu kerugian. Pencatatannya tidak dibebankan ke rekening kerugian piutang tetapi dibebankan ke rekening cadangan kerugian piutang (Zaki Baridwan, 1992:131). Dalam penghapusan piutang, saldo piutang kepada debitur tertentu dikeluarkan dari catatan perusahaan. Sehingga, nama dan saldo piutang langganan yang bersangkutan tidak akan muncul lagi dalam rincian piutang (Soemarso S.R, 1992:372).

### 2.9 Metode Penghapusan Langsung

Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menaksir kerugian dengan tepat. Menurut Soemarso S.R (1992:374) metode penghapusan langsung yaitu mencatat kerugian karena tidak tertagihnya piutang pada saat piutang yang bersangkutan diputuskan untuk dihapuskan. Penggunaan metode penghapusan langsung tidak dapat menunjukkan jumlah piutang yang diharapkan akan ditagih dalam neraca, karena neraca hanya menunjukkan jumlah piutang bruto (Zaki Baridwan, 1992:133).

## 2.10 Pengertian Tata Usaha Pelanggan (TUL)

Tata Usaha Pelanggan (TUL) adalah system pembayaran pelanggan atau calon pelanggan dan masyarakat lainnya baik dengan sistem manual “Tul-Man” atau dengan sistem komputer “Tul-Kom”. Tata usaha pelanggan manual “Tul-Man” adalah tata usaha pelanggan yang tata laksana proses pelaksanaannya menggunakan sarana tulis. Tata usaha pelanggan komputer adalah tata usaha yang proses pelayanannya dengan menggunakan sistem komputer.

Pada “Tul – Kom” di bagi berdasarkan 6 fungsi:

1. Fungsi Pelayanan Pelanggan
2. Fungsi Pencatatan Meter
3. Fungsi Perhitungan / Pembuatan Rekening
4. Fungsi Pembukuan Pelanggan
5. Fungsi Penagihan Pendapatan
6. Fungsi Pengawasan kredit / Pengendalian kredit

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PKN

#### 3.1 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 sejak tahun 1898 saat zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pengolahannya pada saat itu dilakukan dan dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan Perusahaan Listrik Swasta. Dalam perkembangannya Perusahaan Listrik Negara mengalami beberapa tahapan dan dibagi menjadi 5 periode yaitu :

##### 1. Periode Sampai Tahun 1943 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Electriciteit Bedriff Batavia (1893), Electriciteit Bedriff Medan (1903), Electriciteit Bedriff Surabaya (1907) dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat di negara Belanda didirikan di wilayah Indonesia. Pendirian perusahaan Belanda di Indonesia antara lain :

- a. Tahun 1913, Perusahaan Listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi NV (Jatinegara), Tangerang, Cirebon, Kebayoran Lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
- b. Tahun 1914, Perusahaan Listrik NV. ANIEM dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, bukit Tinggi, Pontianak dan Ambon.
- c. Tahun 1915, Perusahaan Listrik ELECTRA dengan wilayah operasi Tulung Agung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM dengan daerah operasi Surakarta.
- d. Tahun 1923/1928, Perusahaan Listrik NV. GEBEO dengan daerah operasi Bandung, Bogor, serta kota seluruh Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
- e. Tahun 1925, Perusahaan Listrik OJEM dengan wilayah operasi Panarukan.
- f. Tahun 1927, Perusahaan Listrik EMR dengan wilayah operasi Rembang dan Bojonegoro. Pada tahun yang sama juga membentuk S'LANDS WATERKRACIT BEDRUVEM (LWB), yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengolah PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dogo, PLTA Ubruk dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Gringin di Madiun, PLTA Tes di

Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTA di Jakarta, juga diberesapa kota Praja dibentuk perusahaan-perusahaan.

g. Tahun 1939, Perusahaan Listrik EMB daerah operasi jember.

## 2. Periode 1943-1945 (Perusahaan Zaman Jepang)

Menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II, Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini Perusahaan Listrik Swasta milik Belanda yang ada di Indonesia tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Untuk Perusahaan Listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai berikut :

- a. Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta
- b. Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat
- c. Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah
- d. Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur.

## 3. Periode 1945-1950

Jatuhnya Jepang ketangan sekutu dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda sehingga seluruh perusahaan listrik diambil alih. Pada masa ini seluruh daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia, pengelolaan listrik dilakukan oleh jawatan Listrik dan Gas. Pengambil alihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. I/SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan sebagai Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan listrik dan Gas di Yogyakarta. Pada masa Agresi Militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaanperusahaan listrik dikuasai kembali oleh pemerintah belanda atau pemilik semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang

bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan KOBARSIH tentang nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas kepada Parlemen Republik Indonesia.

#### 4. Periode 1951-1984

Perusahaan Listrik NV. ANIM, NV.GEBEO, NV. GOEM dikuasai oleh pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik Negara dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan Kepres RI No.163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka Perusahaan Listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 November 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jendral Ketenagaan Kementerian P.U.T berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. 25/45/17 tanggal 23 september 1958 DPR dan Pemerintah RI mengeluarkan UU. No.86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan UU. No.67/1961 terbentuklah Badan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengolah Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu organisasi yang dikenal sebagai Hari Listrik diperingati untuk pertama kalinya pada tahun 1964 (tanggal yang sama) yang bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) berdasarkan peraturan No. I/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik yang memiliki wewenang, merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik di seluruh Republik Indonesia. Dalam kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan bidang ketenagaan ditangani Direktorat Jendral Ketenagaan diganti Dirjen Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan Program Kelistrikan, Pembinaan kelistrikan dan pengembangan energi baru.

## 5. Periode 1985 sampai sekarang

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan UU.No.15/1985 tentang ketenagalistrikan. Penjelasan UU tersebut ditetapkan dalam PP No.10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.PLN yang merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemandirian umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik.

Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT. PLN (PERSERO) sesuai dengan PP RI No.23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi mengorientasikan pada pelanggan, serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No.C2.519.HJ.01.01 Th. 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara No.673/1994.

### 3.2 Visi Misi PT. PLN (Persero)

#### Visi

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

#### Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

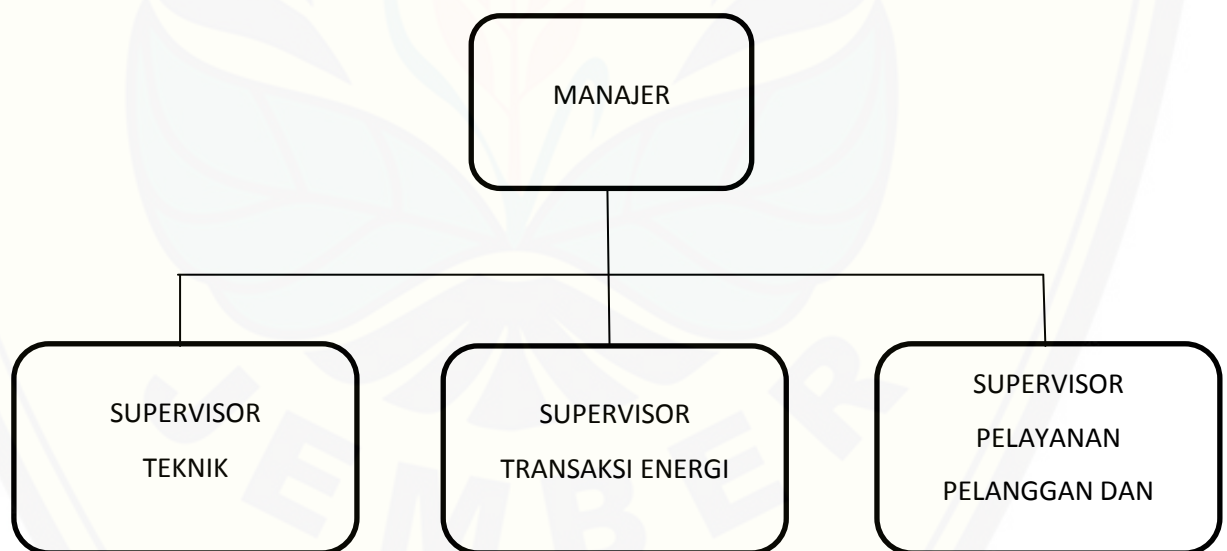
### 3.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap perusahaan harus menetapkan tugas masing-masing bagian yang terkait .Oleh karena itu diperlukan suatu struktur organisasi agar jelas tugas masing-masing bagian tersebut. Dalam hal ini pembagian tugas dan tanggungjawab dalam suatu struktur organisasi bagi suatu

perusahaan akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Keadaan ini akan membantu perusahaan dalam menilai serta mengidentifikasi seberapa besar kemampuan serta skill dari masing-masing bagian yang disesuaikan dengan proporsional jabatan yang dimiliki.

Demikian juga pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember, untuk memperlancar usahanya perusahaan membuat sedemikian rupa system pembagian tugas dan wewenang agar dapat terjadi suatu kerjasama yang selaras dan seimbang antara bagian sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada pada PT. PLN (PERSERO) Cabang Jember. Berdasarkan fungsi dan bentuk struktur organisasinya PT. PLN (PERSERO) Cabang Jember menganut bentuk organisasi dan staf dengan manajer sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi 3 supervisor, yaitu supervisor teknik, supervisor transaksi energi, supervisor pelayanan pelanggan dan administrasi. Manajer bertanggungjawab atas supervisor yang ada dibawahnya.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3 : Bagan Susunan Organisasi Rayon pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Sumber Data : Tata Usaha Komputer (TUL-KOM), Tahun 2010



Tanggungjawab dan wewenang masing – masing jabatan :

1. Tanggungjawab Manajer Rayon

- a. Mengkoordinasikan tugas untuk mencapai target kinerja perusahaan.
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan pelayanan pelanggan, pengelolaan rekening, operasi dan pemeliharaan tenaga listrik, pengendalian losses, pembangkit serta keuangan dan administrasi.
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sesuai kewenangannya untuk memenuhi target dan citra perusahaan.
- d. Memonitoring pelaksanaan sosialisasi K3 untuk keselamatan dan keamanan dalam bekerja.
- e. Memonitoring pelaksanaan Action Plan strategi pencapaian target kinerja perusahaan.
- f. Memonitoring dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik.
- g. Mengevaluasi dan bertanggung jawab atas updating data pelanggan (PDPJ) untuk ketertiban administrasi pelanggan.
- h. Memonitoring dan mengevaluasi penerimaan dan pengeluaran dana imprest untuk kelancaran operasional perusahaan.
- i. Memonitoring dan mengevaluasi atas piutang lancar menjadi piutang ragu – ragu dan pengusulan penghapusan ke Area untuk pengendalian manajemen dalam pengambilan keputusan.
- j. Mengevaluasi penagihan kembali piutang ragu – ragu maupun piutang yang telah dihapuskan untuk meningkatkan pendapatan.
- k. Mengkoordinasikan penandatanganan produk hukum sesuai dengan kewenangannya.
- l. Mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah kerjanya.
- m. Mengkoordinasikan kegiatan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- n. Mengkoordinasikan kewenangan lain sesuai dengan Surat Kuasa dari Manajer Area.

- o. Mengevaluasi pelaksanaan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjaga agar pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.
  - p. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.
2. Tanggung jawab Supervisor Teknik
- a. Mengevaluasi penekanan gangguan penyulang , trafo, JTR, dan SR, APP.
  - b. Melaksanakan pengoperasian penyulang.
  - c. Memonitoring pemeliharaan GTT dan JTR Gardu Distribusi terpadu dan tuntas (Gadis Patas).
  - d. Memonitoring pelaksanaan pelayanan teknik (JTM, GTT, JTR, dan SR APP).
  - e. Melaksanakan pnormalan gangguan penyulang.
  - f. Memonitor pelaksanaan pengukuran beban gardu trafo, tegangan ujung.
  - g. Menyiapkan data usulan pengembangan jaringan.
  - h. Memonitor pembangunan jaringan.
  - i. Melakukan survey dan evaluasi kelayakan teknis.
  - j. Mengkoordinasikan kewenangan lain sesuai dengan Surat Kuasa dari Manajer Area.
  - k. Mengevaluasi pelaksanaan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjaga agar pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.
  - l. Memonitoring dan mengevaluasi penyelesaian klaim, tuntutan ganti rugi / santunan atas terjadinya kecelakaan ketenagalistrikan yang dialami masyarakat untuk citra perusahaan yang baik di masyarakat.
  - m. Memantau dan membina pencapaian sasaran unjuk kerja individu bawahannya.
  - n. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.

3. Tanggung jawab Supervisor Transaksi Energi
  - a. Memastikan perhitungan susut kWh di jaringan Distribusi per penyulang.
  - b. Melaksanakan program penekanan susut kWh sesuai peta susut dan titik transaksi.
  - c. Melaksanakan program pendataan dan penertiban PJU ilegal secara swakelola, menggunakan tenaga ahli daya maupun bekerja sama dengan instansi terkait.
  - d. Melaksanakan pemutusan sementara dan penyambungan kembali karena permintaan pelanggan.
  - e. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan pemutusan.
  - f. Memonitor pelaksanaan kegiatan P2TL.
  - g. Memonitor DPM dan memelihara RBM.
  - h. Mengevaluasi data hasil pembaca meter dan memproses menjadi rekening.
  - i. Memonitor pengendalian baca meter dan menindak lanjuti LBKB.
  - j. Melaksanakan pembinaan petugas pembaca meter.
  - k. Melaksanakan penekanan saldo piutang.
  - l. Melaksanakan pemeliharaan APP.
  - m. Melaksanakan tugas / kegiatan yang ditetapkan pada cascading KPI atasannya.
  - n. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.
  
4. Tanggung jawab Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi
  1. Melaksanakan fungsi tata usaha langganan.
  2. Mengelola keamanan dan K3 di lingkungan gedung rayon.
  3. Mengatur administrasi perkantoran, pemeliharaan gedung/ kantoor dan fasilitas kerja.
  4. Mengelola fungsi keuangan di rayon.
  5. Mengelola fungsi kehumasan.
  6. Melaksanakan administrasi piutang pelanggan lancar.
  7. Melaksanakan legalisasi rekening TNI / Polri.

8. Melaksanakan penagihan rekening PEMDA.
9. Melaksanakan tugas / kegiatan yang ditetapkan pada cascading KPI atasannya.
10. Menyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.

### **3.4 Kegiatan Pokok Perusahaan**

PT. PLN Distribusi Jawa Timur Cabang Jember merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa, yang memiliki tujuan memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat umum yaitu dengan memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan pelayanan lainnya dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam upaya menunjang kebijakan perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, maka PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember mempunyai tugas pokok guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Tugas pokok ini antara lain menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan memberikan pelayanan kepada pelanggan serta mencari keuntungan dari usaha ketenagalistrikan di wilayah kerjanya. Adapun fungsi pokok yang dilaksanakan antara lain :

1. Fungsi Pelayanan Pelanggan (FPL) adalah fungsi yang melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang tata cara, perhitungan besarnya biaya persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan atau pelanggan dan masyarakat umum lainnya. Informasi diberikan di loket pelayanan atau melalui pemasangan keliling. Fungsi pelayanan pelanggan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

2. Fungsi Pembacaan Meter

Fungsi Pembacaan Meter (FPM) adalah fungsi yang melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter, alat pengukur Kwh, meter Kwh, meter Kva (Kilo Volt Ampere) pada setiap pelanggan meter serta pembacaan dan pencatatan penunjukan sakelar waktu.

### 3. Fungsi Pembukuan Pelanggan

Fungsi Pembukuan Pelanggan (FBL) adalah fungsi yang melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pencatatan piutang pelanggan dan UJL (Uang Jaminan Pelanggan).

### 4. Fungsi Penagihan

Fungsi Penagihan (FPN) adalah fungsi yang melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan (Piutang listrik dan piutang lainnya atau rupa rupa).

### 5. Fungsi Pengawasan Kredit

Fungsi Pengawasan Kredit (FPK) adalah fungsi yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pemutusan sementara, penyambungan kembali, pemutusan rampung bagi pelanggan yang terlambat membayar piutang pelanggan dan menyelesaikan penghapusan piutang ragu-ragu (Tagihan kepada pelanggan atas pemakaian daya dan energi listrik karena sesuatu hal diluar kewenangan dan kemampuan PT. PLN tagihan tersebut sukar ditagih dan diragukan pembayarannya).

## **3.5 Kegiatan Fungsi Penagihan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember**

Kegiatan bagian yang dipilih dalam Praktek Kerja Nyata adalah Fungsi Penagihan Rekening meliputi :

1. Merencanakan peningkatan pelayanan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan.
2. Menerima dan menyimpan piutang pelanggan (rekening listrik dan kwitansi rupa rupa) dan daftarnya.
3. Menyiapkan nota tagihan atas piutang pelanggan yang menjadi beban APBN/APBD/Kedutaan dan perwakilan negara asing serta pelanggan tertentu.
4. Mengirimkan piutang pelanggan dan daftarnya kepada pelaksana pelayanan penerimaan pembayaran.

5. Melaksanakan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan.
6. Menerima piutang pelanggan dari tempat pembayaran.
7. Mengirim rekening listrik yang harus diperbaiki dan menerima kembali rekening listrik hasil perbaikan.
8. Memproses piutang pelanggan menjadi piutang ragu-ragu.
9. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan di tempat-tempat pembayaran secara tertib dan teratur.
10. Memantau dan mengawasi rekening listrik yang ditagih dan dilunasi serta yang belum dilunasi di tempat-tempat pembayaran.
11. Melaksanakan pemeriksaan fisik piutang pelanggan yang belum dilunasi di tempat-tempat pembayaran.
12. Melaksanakan koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait.
13. Membuat laporan berkala dibidangnya.

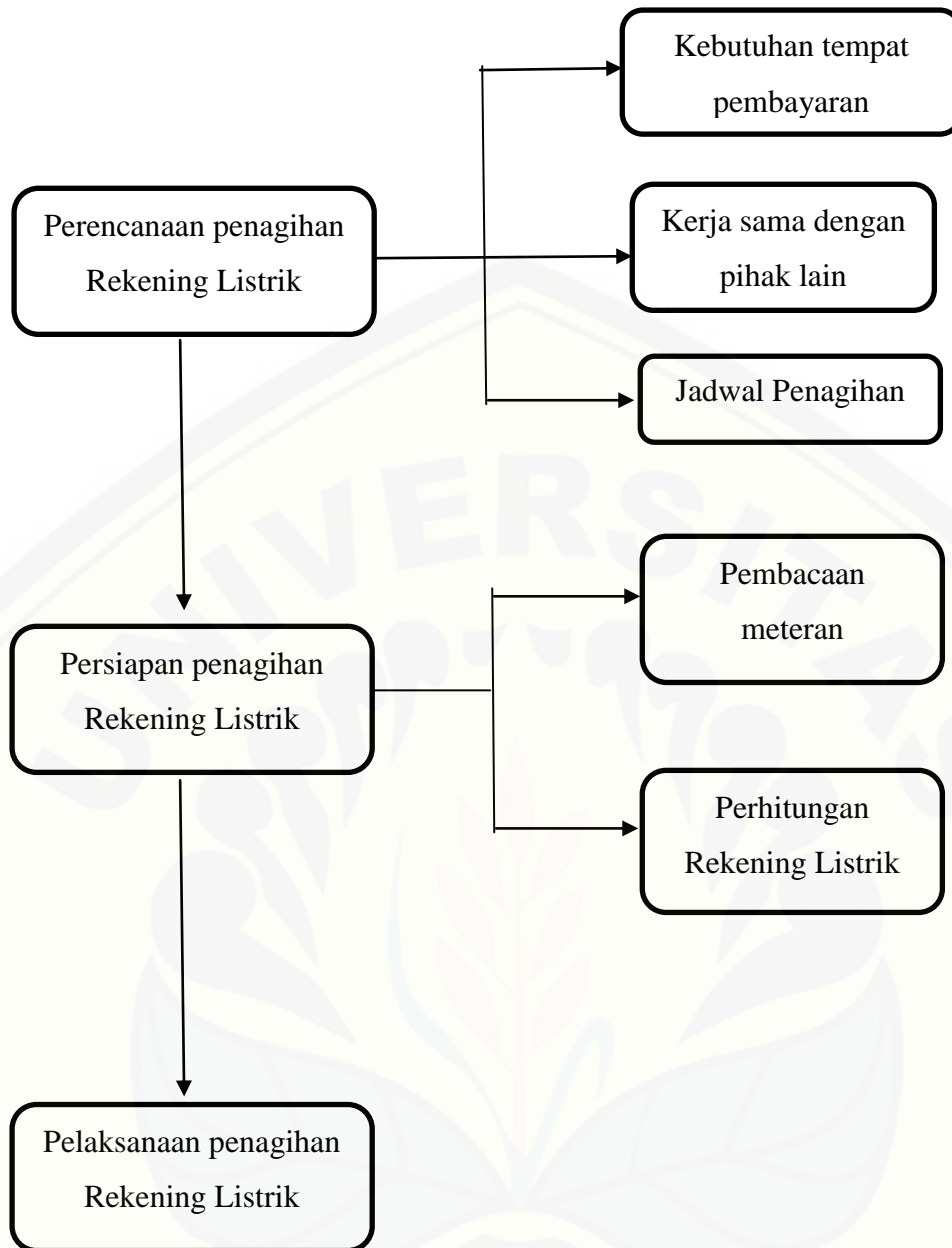
## BAB IV

### HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Kegiatan Praktek Kerja Nyata telah dilaksanakan di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Cabang Jember mulai tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 23 Maret 2015. Penjelasan singkat mengenai cara-cara atau prosedur penagihan rekening listrik adalah sebagai berikut :

#### **4.1 Prosedur Administrasi Penagihan Piutang Rekening Listrik**

Alur – alur prosedur administrasi penagihan piutang rekening listrik di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Unit dan Pelayanan Jaringan Jember Kota adalah sebagai berikut :



Gambar : Alur Prosedur Administrasi Penagihan Piutang Rekening Listrik di PT. PLN (Persero) Unit dan Pelayanan Jaringan Jember Kota

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Unit dan Pelayanan Jaringan Jember Kota.



## 4.1.1 Perencanaan Penagihan Rekening Listrik

Perencanaan penagihan rekening listrik terdiri dari :

### 1. Perencanaan kebutuhan tempat pembayaran

Perencanaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pembayaran rekening listrik kepada pelanggan dengan mudah, cepat dan nyaman yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan.

### 2. Kerja sama PLN dengan pihak lain

Dalam melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik yang berorientasi kepada pelanggan perlu dibuat perencanaan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pengurusan penagihan atau penerimaan pembayaran piutang pelanggan.

Perencanaan ini meliputi :

- a. Pola kerjasama
- b. Sistem pelayanan
- c. Agunan
- d. Hak dan kewajiban

### 3. Jadwal Penagihan

Pelaksanaan pembayaran rekening listrik pelanggan diwajibkan membayar atas pemakaian tenaga listrik setiap bulan. Waktu pembayaran rekening listrik mulai tanggal 1 s.d. 20 setiap bulan. Lewat dari tanggal tersebut dianggap terlambat. Bila pelanggan terlambat membayar rekening listrik akan dikenai Biaya Keterlambatan (BK).

## 4.1.2 Persiapan Penagihan Rekening Listrik

### 1. Pelaksanaan pembacaan meteran

Prosedur penagihan pada PT. PLN (PERSERO) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember awalnya didasarkan pada berapa besar meteran listrik atau biaya pemakaian Kwh setiap bulannya. Petugas pembaca meter PLN datang ke rumah-rumah pelanggan untuk mencatat meteran yang telah terpakai, biasanya dilakukan pembacaan meter dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30.

## 2. Perhitungan rekening listrik

Pendapatan rekening listrik di PT. PLN (PERSERO) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Golongan Tarif Dasar Listrik Golongan TDL merupakan dasar perhitungan yang berisi ketentuan harga jual dan golongan tarif tenaga listrik PLN. Golongan Tarif adalah besarnya Kwh yang digunakan sesuai dengan kontrak.

Tabel Golongan Tarif Daya Listrik 2014

No	Golongan Tarif TR/TM/TT	Batas Daya	Keterangan
1	S-1/ TR	220 VA	Golongan tarif untuk keperluan sangat kecil
2	S-2/ TR	450 VA s.d 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang
3	S-3/ TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar
4	R-1/ TR	450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil
5	R-2/ TR	3.500 VA s.d 5.500 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah
6	R-3/ TR	di atas 6.600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar
7	B-1/ TR	450 VA s.d 5.500 VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil
8	B-2/ TR	6.600 VA s.d 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah
9	B-3/ TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar
10	I-1/ TR	450 VA s.d 14 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/ industri rumah tangga
11	I-2/ TR	14 kVA s.d 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri sedang
12	I-3/ TM	di atas 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri menengah
13	I-4/ TT	30.000 kVA	Golongan tarif untuk keperluan industri besar
14	P-1/ TR	450 VA s.d 5.500 VA	Golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah kecil
15	P-1/ TR	6.600 VA s.d 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang
16	P-2/ TM	200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar
17	P-3/ TR	-	Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum
18	T/ TM	di atas 200 kVA	Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Traksi perusahaan kereta listrik
19	C/ TM	di atas 200 kVA	Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan penjualan curah bagi pemegang izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik
20	L/ TR, TM, TT	-	Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Layanan Khusus diperuntukan bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah

Sumber data : PT. PLN (Persero) Cabang Jember, Tahun 2014

Keterangan :

TR : Tegangan Rendah

kVA : Kilo Volt Ampere

TM : Tegangan Menengah

VA : Volt Ampere

TT : Tegangan Tinggi

**b. Biaya beban**

Biaya beban adalah biaya yang dikenakan berdasarkan besarnya kontrak VA (Volt Ampere) yang terpasang disetiap rumah pelanggan

**Tabel Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga**

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRABAYAR (RP/ kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/ kVa/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/ kWh)	
1	R-1/ TR	s.d. 450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh :169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh :360 Blok III : di atas 60 kWh :495	415
2	R-1/ TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh :275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh :445 Blok III : di atas 60 kWh :495	605
3	R-1/ TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4	R-1/ TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5	R-2/ TR	3.500 s.d. 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6	R-3/ TR	6.600 VA ke atas	*)	1.352	1.352
Catatan : *) diterapkan rekening minimum (RM) : $RM 1 = 40 \text{ (jam nyala)} \times \text{daya tersambung (kVa)} \times \text{biaya pemakaian}$					

Sumber data : PT. PLN (Persero) Cabang Jember, Tahun 2014

c. Biaya pemakaian (kwh)

Merupakan biaya yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan banyaknya kWh per bulan. Contoh perhitungan rekening listrik berdasarkan TDL (Tarif Dasar Listrik) 23 Februari s/d 23Maret 2015 disajikan dalam lampiran yang tersedia.

d. Biaya Keterlambatan ini dikenakan atas tiap lembar rekening dihitung untuk tiap bulan keterlambatan sesuai dengan golongan tarifnya. Lihat pada tabel berikut.

**TABEL 1 BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK**

No	Batas Daya	Biaya Keterlambatan (Rp/bulan)
1	450 VA	Rp. 3000
2	900 VA	Rp. 3000
3	1.300 VA	Rp. 5000
4	2.200 VA	Rp. 10000
5	3.500 VA s.d 5.500 VA	Rp. 50000
6	6.600 VA s.d 14.000 VA	3% (tiga persen) dari tagihan rekening listrik (minimum Rp. 75000)

Sumber : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 33 TAHUN 2014  
 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

### **4.1.3 Pelaksanaan Penagihan Piutang Rekening Listrik**

a.) Proses penagihan rekening listrik

Proses penagihan rekening listrik dapat dilihat langkah-langkah sebagai berikut :

1. Fungsi penagihan adalah fungsi yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan untuk seluruh pelanggan

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan penagihan rekening listrik ini dilaksanakan sebulan sekali yang di mulai dari pembacaan meter, yang kemudian hasil baca meter tersebut diolah oleh fungsi pembuatan rekening.

2. Persiapan penerimaan rekening listrik dari fungsi pembuatan rekening maupun dari fungsi pelayanan, terdiri dari :
  1. Daftar rekening listrik (TUL III-04)
  2. Fisik lembar rekening listrik (TUL III-03) dan kwintansi rupa-rupa
  3. Data dalam media rekaman computer
  4. Daftar pengiriman rekening listrik (TUL V-01)

Rekening listrik dan daftar rekening listrik disimpan dengan aman dan baik. Data rekening listrik dan kwintansi rupa-rupa di transfer ke dalam data induk saldo. Data ini digunakan sebagai data induk awal.

3. Mutasi penambahan dan pengurangan sampai dengan saldo akhir perbulan maupun saldo seluruhnya di proses dengan media computer. Sebelum perekaman data saldo rekening kedalam data induk saldo harus diadakan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran data tersebut dengan membuat rekapitulasi penerimaan data rekening. Kemudian dicocokkan dengan rekapitulasi rekening. Proses penggabungan data tersebut menghasilkan tabel-tabel tempat bayar (Payment Point) untuk seluruh unit-unit PLN.
4. Proses penggabungan rekening listrik menghasilkan data induk saldo loket PLN seluruh unit.
5. Persiapan pengiriman rekening listrik ke tempat pembayaran dilakukan dengan mempersiapkan daftar rekening listrik dalam bentuk media rekaman, fisik rekening, kwintansi rupa-rupa dan berita acara rekening listrik ke payment point oleh unit-unit PLN.
6. Pembuatan berita acara rekening listrik dan TUL V-01 telah selesai dibuat oleh kantor PLN setempat untuk keperluan pengiriman file data maupun fisik rekening ke payment point.
7. Dilakukan penyerahan daftar rekening listrik dalam bentuk media rekaman, fisik rekening listrik, kwintansi rupa-rupa, serta berita acara

rekening listrik serta lampiran TUL V-01 ke tempat pembayaran atau payment point.

8. Setelah jadwal pembayaran tiba, pelanggan secara bergantian membayar tagihan rekening listrik di tempat-tempat pembayaran secara tertib dan teratur. Jadwal pelayanan penerimaan pembayaran setelah berakhirnya masa pembayaran yang telah ditentukan dilayani di kantor PLN area atau unit.
9. Guna mempercepat penerimaan pendapatan yang bersumber pada piutang pelanggan serta untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan penerimaan pembayaran, telah disusun rencana jadwal pembayaran untuk masing-masing tempat pembayaran. Pelanggan dapat membayar ke loket-loket tersebut dengan menunjukkan nomer idpel (identitas pelanggan) yang telah dibuat oleh PLN.
10. Berdasarkan saldo pelunasan setiap hari akan dibuatkan :
  1. Daftar rekening yang lunas atau tidak lunas (TUL V-04)
  2. Bukti penyetoran uang (TUL V-06)
  3. Ikhtisar mutasi piutang pelanggan (TUL V-02)Berdasarkan data induk saldo tanpa tunggakan pelanggan memperoleh kwintansi rupa-rupa. Data rekening listrik maupun data kwintansi rupa-rupa yang lunas akan dikirim ke PLN (Fungsi Penagihan)
11. Data rekening listrik maupun kwintansi rupa-rupa yang lunas dikirim ke PLN (Fungsi Penagihan) dengan melakukan proses copy data dari komputer tempat pembayaran ke media rekaman komputer.
12. Berdasarkan daftar rekening listrik yang lunas tersebut, loket-loket mentransfer uang masing-masing pelanggan ke rekening pendapatan (Receipt Account) PLN yang telah ditetapkan. Data rekening listrik maupun daftar kwintansi rupa-rupa yang lunas akan dikirimkan ke PLN (Fungsi Penagihan).
13. Kemudian kantor PLN unit jember akan mencatat daftar rekening listrik yang lunas atau belum lunas yang telah dibayar di payment point, serta mencatat bukti penyetoran uang.

14. Pada akhir periode pembayaran akan dibentuk data tunggakan atau daftar pelanggan yang belum lunas karena jadwal pembayaran melewati batas tanggal pembayaran yang telah ditentukan, maka akan dilayani di kantor PLN unit.

b.) Pelayanan Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik di tempat Pembayaran

1. Pelayanan Pembayaran Rekening Listrik dengan cara Giralisasi

Giralisasi adalah pembayaran rekening listrik dengan cara transfer uang pelanggan di suatu bank dimana banknya PLN berbeda dengan bank pelanggan dan banknya pelanggan tersebut tidak melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik. Pembayaran rekening listrik dengan cara giralisasi tersebut tidak dapat langsung dilakukan. Akan tetapi perlu dibuat perjanjian antara PLN dengan bank yang bersangkutan.

Perjanjian tersebut antara lain berisi :

- a. Kesiapan bank untuk membayarkan tagihan listrik pelanggan dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening receipt PLN di bank yang telah ditunjuk oleh PLN pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Kesiapan bank untuk mengirim rekening listrik yang telah dilunasi melalui giralisasi kepada pelanggan PLN atau nasabah bank tersebut.

2. Pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik dengan cara legalisasi (pengesahan)

Rekening listrik yang pembayarannya dibiayai dari APBN-HANKAM atau ABRI diselesaikan secara terpusat dengan cara legalisasi. Rekening listrik ini telah dibuat dengan kode golongan 1 (ABRI). Kode golongan tersebut dibedakan menjadi :

- a. Angkatan darat : Golongan ID
- b. Angkatan laut : Golongan IL
- c. Angkatan udara : Golongan IU
- d. POLRI : Golongan IP
- e. Hankam/ Mabes ABRI : Golongan IA

3. Pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik yang dibiayai APBN/APBD

Rekening listrik yang dibayar dengan dana APBN bukan HANKAM/ABRI dan APBD-PEMDA. Pembayaran diselesaikan dengan cara ditagih ke instansi yang bersangkutan. Rekening listrik yang dibayar dengan dana APBN ini adalah rekening listrik dengan kode golongan 2 dan yang dibayar dengan dana APBD adalah rekening listrik dengan kode golongan 3.

## **4.2 Kegiatan Lain Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **4.2.1 Pembuatan rekap tagihan pelanggan tunggakan**

Pelayanan pembayaran tagihan rekening listrik di tempat pembayaran dilaksanakan dengan sistem online dengan menggunakan media komputer. Fungsi pemakaian media komputer ini untuk menunjang kelancaran pengawasan kredit di PLN. Pembayaran rekening listrik ini dilaksanakan oleh petugas yang mengakses data rekening listrik yang akan dibayar berdasarkan nomer pelanggan. Pengiriman Rekening Listrik dan Daftar Rekening Listrik yang belum lunas selambat – lambatnya 1 hari setelah berakhirnya periode pembayaran yang telah ditetapkan. Rekening listrik, daftar rekening listrik yang belum lunas (TUL V – 04) dikirim ke FPN. Petugas loket tempat pembayaran membuat dan mengirim :

- a. Ikhtisar laporan mutasi rekening listrik yang ada ditempat pembayaran (TUL V -03)
- b. Daftar rekening listrik yang belum lunas
- c. Ikhtisar penyelesaian pembayaran rekening listrik (TUL V – 04). Sebelum ikhtisar penyelesaian pembayaran rekening listrik (TUL V – 04) ditanda tangani, FPN melakukan pencocokan lebih dulu jumlah lembar dan rupiah rekening yang belum lunas dengan ikhtisar penyelesaian pembayaran rekening listrik (TUL V – 05). Dan ikhtisar laporan mutasi rekening listrik yang ada ditempat pembayaran (TUL V – 04). Ikhtisar penyelesaian pembayaran rekening listrik (TUL V – 05) setelah ditanda tangani FPN sebagai pertanggung jawaban penyelesaian rekening listrik yang belum lunas.



## 4.2.2 Pembuatan Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan

1. Melakukan pemberitahuan pelaksanaan pemutusan dan akan dilakukan Pemutusan sementara (Lihat Fomulir 1)
  - a. PLN akan melaksanakan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik pada pelanggan apabila pelanggan belum melunasi pembayaran rekening listrik dalam jangka waktu 1 bulan (Lihat Fomulir 2)
  - b. Pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan golongan tarif untuk setiap bulan keterlambatan.
  - c. Penyambungan kembali akan dilakukan oleh PLN apabila pelanggan telah melunasi pembayaran rekening listrik ditambah Biaya Keterlambatan (Fomulir 4)
  - d. Apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama pelaksanaan pemutusan sementara pelanggan belum juga melunasi pembayaran rekening listriknya maka PLN akan melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PLN. Permintaan penyambungan kembali diperlakukan sebagai permintaan penyambungan baru dan permintaan tenaga listrik wajib melunasi tunggakan dan tagihan susulan (bila ada).

Fomulir 1 : Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik

**PT. PLN (PERSERO)**  
 DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
 AREA UPJ JEMBER KOTA  
 RAYON

No.: 51601/VI-01/22022015-159  
 51601/VI-01/22022015-159

Petugas: SUGIANA

**PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMUTUSAN SEMENTARA SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK**

Kepada Yth.:

Nama : P NURAEHAN  
 No. Pelanggan : 516010372622  
 Alamat : JL SUMAIRA 9 31 RT. 2 RW. 2 TGLBOTO KDL  
 Kode Kedudukan : GABKBAD33200  
 Data Rekening Listrik: GARDU: GA197/C04B03  
 Tarif / Daya : R1 / 900VA  
 Rekening Bulan: PEB-2015 s/d MAR-2015  
 Jumlah Biaya Keterlambatan s.d. bulan: MAR-2015

No. Meter:	2	Lbr. Rp.	206,839
Jumlah:		Rp.	6,000
Jumlah	:	Rp.	212,839

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini sambungan tenaga listrik di Instalasi Saudara terpaksa kami putus untuk sementara karena menurut catatan kami ternyata Saudara belum melunasi rekening listrik bulan/tahun : pada waktu yang telah ditentukan. Penyambungan kembali akan dilakukan apabila jumlah rekening listrik tersebut serta Biaya Keterlambatan dilunasi di Kas s.d. pada setiap hari kerja Senin s.d. Kamis pukul : dan Sabtu pukul s.d.

Apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama dari jangkanya waktu pelaksanaan pemutusan sementara belum juga dilunasi, maka PLN berhak melakukan pemutusan rampung sambungan tenaga listrik dengan mengabaikan seluruh Instalasi milik PLN. Permintaan Penyambungan kembali diberlakukan sebagai permintaan penyambungan baru, peminta diwajibkan membayar biaya penyambungan baru (BP) dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) serta rekening listrik, tagihan lainnya yang belum dilunasi.

**PADA WAKTU MELAKUKAN PEMBAYARAN DIMOHON MENUNJUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN INI KEPADA PETUGAS LOKET PEMBAYARAN**

J) Coret yang tidak perlu  
 AS TUL VI - 01  
 Manager,

Fomulir 2 : Perintah Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik

PT. PLN (PERSERO)  
 DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
 AREA UPJ JEMBER KOTA  
 RAYON Tanggal Cetak: 13-03-2015; Petugas: SUGIANA

No.: 51601/VI-01/22022015-159  
 51601/VI-01/22022015-159

**PERINTAH PEMUTUSAN SEMENTARA SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK**

Kepada Yth. :

Nama : P. NURAEAMAN  
 No. Pelanggan : 516010372622  
 Alamat : JL. SUMATRA 9 31 RT. 2 RW. 2 TGLBOTOQDL  
 Kode Kedudukan : GAEBAD33200  
 Data Rekening Listrik : GAROU: GA197/C04603  
 No. Meter: / 900VA  
 Tarif / Daya : REB-2015 s/d MAR-2015  
 Rekening Bulan: MAR-2015  
 Jumlah Biaya Keterlambatan s.d. bulan : MAR-2015

Jumlah : 2 Lbr. Rp. 206,839  
 Rp. 6,000  
 Jumlah : Rp. 212,839

Pelaksanaan Pemutusan Sementara		
Tanggal	Angka Kedudukan Meter Akhir	
	LWBP	WBP
		kVAh
Nama dan Paraf		
Pelaksana Pengawas / Pe- nanggung Jawab		

RISTU EKA SASMITA  
 Manager,

\*) Coret yang tidak perlu  
 A5 TUL VI - 01

## 2. Akan dilakukan Pemutusan Rampung Aliran Listrik

PLN akan melaksanakan pemutusan rampung (bongkar rampung) aliran listrik pada Pelanggan yang sudah menunggak 3 bulan ke atas

### Formulir 3 : Penyesaian Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik

**PT. PLN (PERSERO)**  
 DISTRIBUSI JAWA TIMUR JEMBER  
 AREA : UPJ JEMBER KOTA  
 RAYON : Tanggal Cetak: 13-03-2015; Petugas: SUGIAMA

No. : 51601/VI-01/22022015-159  
 51601/VI-01/22022015-159

**PENYELESAIAN PEMUTUSAN SEMENTARA SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK**

Kepada Yth. :

Nama : P. NURAEMAN  
 No. Pelanggan : 516010372622 Kode Kedudukan : BARKB0033200  
 Alamat : JL SUMATRA 9 31 RT. 2 RW. 2 TGLBOTO KUL  
 Data Rekening Listrik : GARDU: GA197/C04B03  
 Tarif / Daya : R1 / 900VA No. Meter:  
 Rekening Bulan: PEB-2015 s/d MAR-2015 Jumlah : 2 Lbr. Rp. 206.839  
 Jumlah Biaya Keterlambatan s.d. bulan : MAR-2015 Rp. 6.000

**Jumlah : Rp. 212.839**

Pelaksanaan Pemutusan Sementara				Pelaksanaan Penyambungan Sementara			
Tanggal	Angka Kedudukan Meter Akhir			Tanggal	Angka Kedudukan Meter Awal		
	LWBP	WBP	kVAh		LWBP	WBP	kVAh
Nama dan Paraf							
Pelaksana				Pelaksana			
Pengawas / Penanggung Jawab				Pengawas / Penanggung Jawab			

Manager,

Catatan :  
 A5 TUL VI - 01

Jika pelanggan yang telah dibongkar rampung meminta kembali sambungan listriknya, yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai calon pelanggan baru sehingga harus membayar biaya penyambungan, uang jaminan langganan serta harus melunasi tunggakan yang tersisa.

## Formulir 4 : Perintah Penyambungan Kembali Sambungan Tenaga Listrik

PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
AREA : KOTA JEMBER  
RAYON : KOTA JEMBER KOTA  
Tanggal Cetak: 13-03-2015; Petugas: SUGIANA  
No. : 51601/VI-01/22022015  
51601/VI-01/22022015-159

**PERINTAH PENYAMBUNGAN KEMBALI SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK**

Kepada Yth. :

Nama : P. MURAEAN  
No. Pelanggan : 516010372622  
Alamat : JL. SUMATRA 9/31 RT. 2 RW. 2 TEL. BOTOKDL  
Data Rekening Listrik : GARDU: GA197/C04603  
Tarif / Daya : R1 / 900VA  
Rekening Bulan: FEB-2015 s/d MAR-2015  
Jumlah Biaya Keterlambatan s.d. bulan : MAR-2015

Kode Kedudukan : GARKBAD33200  
No. Meter :  
Jumlah : 2 Lbr. Rp. 206.839  
Rp. 6.000  
Jumlah : Rp. 212.839

Pelaksanaan Penyambungan Sementara			
Tanggal	Angka Kedudukan Meter Awal		
	LWBP	WBP	kVArh
Nama dan Paraf			
Pelaksana			
Pengawas / Penanggung Jawab	Manager,		

\*) Coret yang tidak perlu  
A5 TUL VI - 01

### 4.2.3 Perhitungan Rekening Listrik

#### a. Pelanggan tanpa Mutasi

Berdasarkan data induk pelanggan yang ada sesuai statusnya, tarif dasar listrik yang berlaku dan diperhitungkan jumlah rupiah rekening.

#### b. Pelanggan mengalami Mutasi

##### 1. Penyambungan Baru

Penyambungan baru merupakan jenis mutasi yang menambah jumlah pelanggan dalam DIL.

##### 2. Berhenti sebagai pelanggan

Berhenti sebagai pelanggan akan mengurangi jumlah pelanggan Rekening Listrik dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan penghentian penyalur tenaga listrik.

3. Perubahan golongan tarif dengan daya tetap  
Perubahan tarif atas pelanggan, rekening listrik sampai tanggal pembayaran biaya perubahan tarif lama, sedangkan mulai tanggal pembayaran biaya perubahan tarif dihitung tarif baru.
4. Perubahan daya dengan tarif tetap  
Rekening listrik sampai tanggal pelaksanaan perubahan dihitung dengan daya lama sedangkan mulai tanggal pelaksanaan perubahan daya baru.
5. Perubahan daya dengan perubahan tarif  
Rekening listrik sampai tanggal pelaksanaan perubahan daya, dihitung dengan daya lama dan tarif lama. Sedangkan mulai tanggal pelaksanaan perubahan daya baru dan tarif baru dihitung dengan daya baru dan tarif baru.
6. Perubahan nama  
Untuk balik nama, rekening dihitung dengan nama lama dihitung sampai tanggal pembayaran UJL. Untuk ganti nama, perhitungan rekening listrik tidak mengalami pemecahan (dihitung normal).

#### **4.2.4 Menggolongkan Rekening Listrik**

Setiap bulannya PT. PLN (Persero) untuk masing – masing Unit Pelayanan mencetak rekening listrik. Rekening yang telah tercetak dan siap untuk di kirim ke Payment Point (tempat pembayaran) yang sudah ada, terlebih dahulu rekening listrik disusun per kode golongan dan urutan dari nomor pelanggan besar. Untuk memudahkan pencarian rekening listrik, urutan ini tidak boleh diubah dan pada saat akan membayar rekening listrik pelanggan cukup menunjukkan nomer pelanggannya kepada petugas Fungsi Penagihan (FPN). Prosedur pembayaran listrik yang sekarang diterapkan pada PT. PLN (Persero) antara lain :

##### **A. Pasca Bayar**

Pasca Bayar yaitu listrik yang tiap bulannya dilihat pada ukuran meternya yang diperhitungkan dalam pembayaran rekening listrik. Membantu proses perhitungan rekening listrik di bagian Fungsi Pembuatan Rekening (FPR) termasuk pembayaran Pasca Bayar. Pembuatan rekening listrik untuk

setiap pelanggan dilaksanakan sebulan sekali. Pada dasarnya perhitungan rekening listrik dilakukan pada komputerisasi namun perhitungan ini didasarkan pada beberapa unsur – unsur diantaranya adalah :

1. Golongan tarif adalah besarnya Kwh yang digunakan sesuai dengan kontrak.
2. Biaya beban adalah biaya yang dikenakan berdasarkan besarnya kontrak VA (Volt Ampere).
3. Biaya pemakaian adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan banyaknya pemakaian Kwh per bulan.

Unsur – unsur di atas telah di proses sedemikian rupa ke dalam komputer untuk memudahkan dan mempercepat proses perhitungan rekening listrik. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan rekening listrik berdasarkan TDL 11 November 2014.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dikenakan pada setiap pelanggan yang sudah tercantum dalam lembaran rekening pelanggan setiap bulannya, besarnya tergantung pada type tariff pelanggan yaitu : untuk tarif R sebesar 10% dari pemakaian pelanggan, tarif I sebesar 3% dari pemakaian. Keputusan penentuan tarif tersebut ditentukan oleh Pemerintah Jember. Penerangan jalan yang kita nikmati itu merupakan hak kita setelah membayar pajak sebagai kewajiban. Pajak yang sudah kita bayar termasuk dalam rekening listrik yang kita bayar setiap bulannya, besarnya sudah ada ketentuan sendiri yang sudah disebut sebelumnya. Dalam ini PLN akan memisahkan dan mengumpulkan antara pemakaian per Kwh dengan PPJ setiap lembar rekening yang sudah dilunasi oleh pelanggan. Kemudian uang yang sudah terkumpul di PLN diserahkan ke PEMDA sebagai instansi yang bertanggung jawab. Selanjutnya Pemerintah Daerah yang akan membayar semua per Kwh untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) setiap bulannya.

Fomulir Informasi Tagihan Listrik

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR APJ JEMBER UPJ JEMBER KOTA		<b>INFORMASI TAGIHAN LISTRIK</b>				
		PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl Trunojoyo Blok M 1 / 135 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan NPWP : 01.001.629.3-051.000				
Kepada Yth DRS HARTONO JL NANGKA 2 7 RT. 4 RW. 4 PATRANG NPWP : ... No Invoice : 516010156469-0315		Id Pelanggan : 516010156469 Rekening Bulan : 03-2015 Tarif / Daya : R1 / 900 VA Tarif / Daya Lama : / 0 VA FKT kWh/kVarh/FRT : / / / FKT kWh/kVarh/FRT LM : / / / Jam Nyala / Fak K : 36				
Catatan Meter		Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Meter Akhir		22-02-2015	11,137,000			
St Awal		25-01-2015	11,105,000			
Selisih Stand (st akhir - st awal * fkm)			20,000	12,000		
Pemakaian kWh Total			20,000	12,000	32,000	0,000
1. Biaya Beban					Rp	18,000
2. Biaya Pemakaian						
		LWBP		WBP		kVarh
Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh
						Biaya kVarh
						Sub Total
A						
B						
C						
D						
		BLOK I		BLOK II		BLOK III
Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh
						Biaya Pemk
						Sub Total
Baru	20	275	5,500	12	445	5,340
Lama						0
						495
						0
						10,840,00
3. Rupiah PTL Bruto					Rp	28,840
4. Rupiah Diskon					Rp	0
5. Jumlah Rupiah PTL Netto					Rp	28,840
6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan					Rp	28,840
7. Angsuran					Rp	0
8. PPJ					Rp	2,884
PTL		10,00 (%) x	28,840	Rp	2,884	
9. PPN					Rp	0
10. Biaya Sewa Trafo/Pemakaian Trafo/Kapasitor					Rp	0
11. Materai					Rp	0
TERBILANG					JUMLAH TAGIHAN	Rp 31,724
Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah						
Batas Akhir Masa Bayar 20 Maret 2015						
Status : LUNAS (11)						
Tanggal Bayar : 10/03/2015						
Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0						
Keterangan :						
A = Tarif/Daya Baru TTL Baru						
B = Tarif/Daya Lama TTL Baru						
C = Tarif/Daya Baru TTL Lama						
D = Tarif/Daya Lama TTL Lama						



Sumber data : PT. PLN (Persero) Cabang Jember



- a. Maksud : Perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energy listrik dan tagihan – tagihan lain yang berhubungan dengan pemakaian Tenaga Listrik oleh pelanggan dan setelah dilunasi merupakan bukti pembayaran.
- b. Jumlah lembar : 1
- c. Isi : Bukti pembayaran tagihan listrik dan bukti pembayaran PPJ
- d. Umum : diisi dengan komputerasi oleh Fungsi Pengihan (FPN)
- e. Petunjuk pengisian :
  - 1.) Bukti pambayaran Tagihan Listrik
    - a.) Area pelayanan : diisi sesuai tempat area pembayaran
    - b.) UPP : diisi sesuai dengan lingkup kerja yang ditanda tangani
    - c.) IDPEL : diisi identitas pelanggan tau nomer pelanggan
    - d.) Nama : diisi nama pelanggan
    - e.) Alamat : diisi nama alamat pelanggan
    - f.) Tarif/ daya : diisi sesuai dengan besarnya tarif dan daya yang dipakai pelanggan
    - g.) LWBP : diisi pemakaian Kwh diluar waktu beban puncak (antara pukul 23.00 s.d. 17.00)
    - h.) WBP : diisi pemakaian Kwh waktu beban puncak (antara pukul 18.00 s.d. 22.00)
    - i.) KVARH : diisi pemakaian Kwh satuan besar tarif besar. Contohnya tarif ganda industry
    - j.) BL / TH : diisi bulan dan tahun yang menjadi tagihan
    - k.) KDDP / KLP : diisi dengan nomor identitas pelanggan, kode cabang dan kelompok pembayaran
    - l.) Jatuh tempo : diisi tanggal akhir pembayaran
    - m.) Tanggal bayar : diisi tanggal pembayaran
    - n.) Rp. PLN : diisi jumlah rupiah pemakaian tenaga listrik
    - o.) Rp. BK : diisi rupiah biaya keterlambatan
    - p.) Rp. Total : diisi jumlah total rekening listrik
    - q.) Terbialng : menerang jumlah tagihan

## 2.) Bukti Pembayaran PPJ :

- a. BL /TH : diisi bulan dan tahun yang menjadi tagihan
- b. IDPEL : diisi identitas pelanggan
- c. Nama : diisi nama pelanggan
- d. Tarif : diisi sesuai besarnya tarif yang dipakai pelanggan
- e. PEMDA : diisi dengan kode yang berlaku oleh PEMDA
- f. % PPJ : diisi sesuai tarif yang diperlakukan oleh PEMDA
- g. PTL : diisi jumlah rupiah pemakaian tenaga listrik
- h. PPJ : diisi jumlah rupiah pajak
- i. Informasi : diisi dengan perhitungan rupiah berdasarkan tarif, biaya beban, tempat pembayaran, dan kode loket / password
- j. Golongan : diisi sesuai jenis rekening ( 0 golongan umum)

## B. Prabayar (Token)

Pembayaran listrik prabayar (yang disebut token) yaitu pembayaran yang menggunakan pulsa di rekening listrik yang tidak setiap bulannya untuk membayar. Kode 20 digit yang dimasukkan ke meter listrik prabayar, sehingga dapat menyalurkan sejumlah meter (Kwh) listrik ke instalasi. Alasan mengapa PT. PLN menyediakan listrik prabayar karena pihak PLN tidak mau dirugikan oleh pihak pelanggan yang selalu pembayaran menunggak tiap bulannya. Listrik Prabayar terdiri dari :

- a. Unsur Kwh, PPJ, Biaya Administrasi, dan materai
- b. Pembelian pulsa Tokennya terdiri pilihan nilai (Rp) yaitu Rp.20.000,00 ; Rp.50.000,00 ; Rp.100.000,00 ; Rp.250.000,00 ; Rp.500.000,00 ; dan Rp.1.000.000,00
- c. Tidak ada kadaluarsa walau tidak dipakai tiap bulannya
- d. Tidak dikenakan denda tiap bulannya walau tidak membeli pulsa prabayar.

Listrik Prabayar yang dilingkupi diantaranya pelanggan, retailer, PT. POS, dan BANK

a. Pelanggan

Pelanggan bisa mengendalikan sendiri pemakaian listrik, privasi tidak terganggu, pembelian disesuaikan pemakaian listrik, tidak sanksi pemutusan dan tidak ada sanksi keterlambatan pembayaran listrik.

b. Retailer

Dalam transaksi rutin, layanan voucher isi ulang, manfaat transaksi lain, dan akan menmbuh peluang.

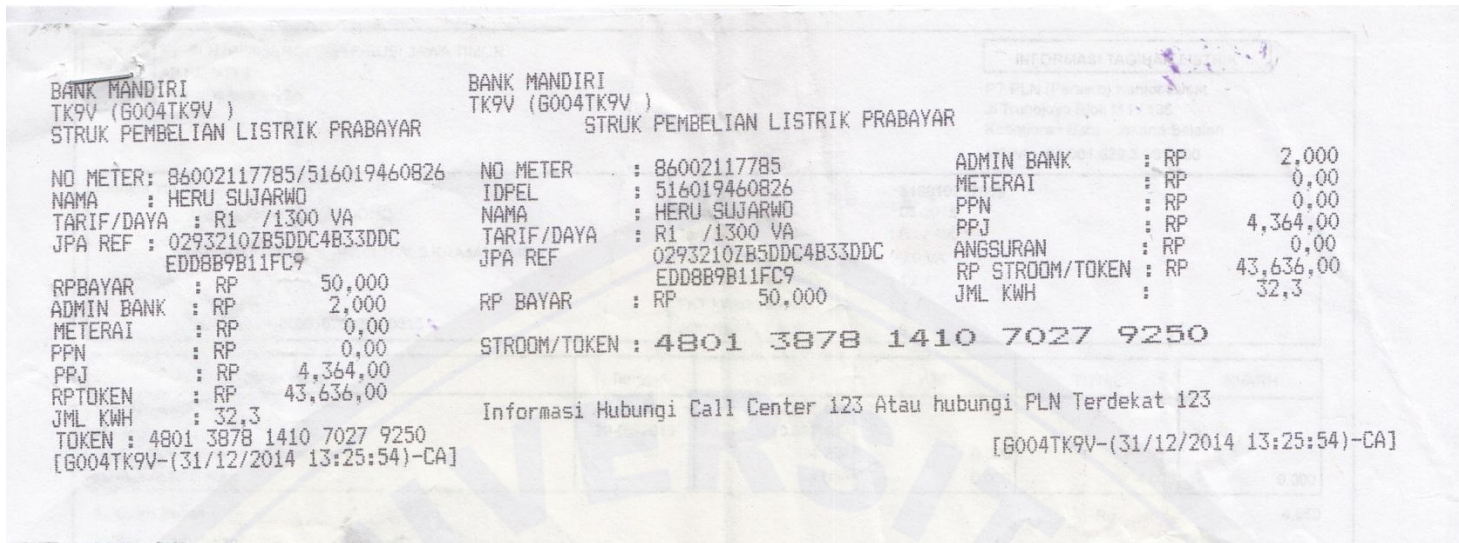
c. PT. POS

Promosi Giro, transaksi rutin pembayaran, rutin sms LPB pos, dan one stop service.

d. BANK

Peluang nasabah setara dengan pelanggan PT. PLN DJBB, promosi kartu kredit, transaksi rutin, database pelanggan, dan promosi melalui EBC SMS Banking.

Gambar : Bukti Pembelian Pulsa Listrik



Sumber data : PT. PLN (Persero) Cabang Jember, Tahun 2014

- Nomor meter : nomor meter yang ada di staf meternya
- Nama : diisi nama pelanggan
- Tarif : diisi sesuai besarnya tarif yang dipakai pelanggan
- MKM REF : diisi nomor urutan rekening pada PT. PLN
- Admin Bank : diisi dengan biaya administrasi pada bank
- Total bayar : diisi dengan total rekening listrik pada pelanggan
- BL / TH : diisi bulan dan tahun yang menjadi tagihan
- Stand meter : diisi per meter dari akhir dan awal pemakaian
- Non subsidi : diisi biaya subsidi pada rekening

C. Pembayaran Non Tagihan Listrik ( Non Taglis)

Pembayaran Non Taglis seperti pembayaran penyambungan baru listrik, PESTA (Penyambungan Sementara), P2TL (Penyambungan Penerangan Tenaga Listrik), Perubahan Daya, dan OPHAL ( Operasi Penertiban Aliran Listrik). Yang dilakukan dalam pembayaran sistem online. Contoh pembayaran non taglis

Bukti Pembayaran Non Tagihan Listrik

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

\*\*\* ASLI/20150319112704/1.0.2.19 \*\*\*

PPOB - BANK BRI - KIPO FORKOM/00000002 = (KP0010759/2015-03-19 11:38:20)

STRUK NON TAGIHAN LISTRIK

TRANSAKSI : MIGRASI PRABAYAR  
NO REGISTRASI : 5160117020684  
TGL REGISTRASI : 19MARI15  
NAMA : NYONO PEG PMK  
IDPEL : 516010117752  
BIAYA PLN : Rp 20.000  
MLPO REF : OKP021SY0223B44662

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

ADMIN BANK : Rp 1.800  
TOTAL BAYAR : Rp 21.800

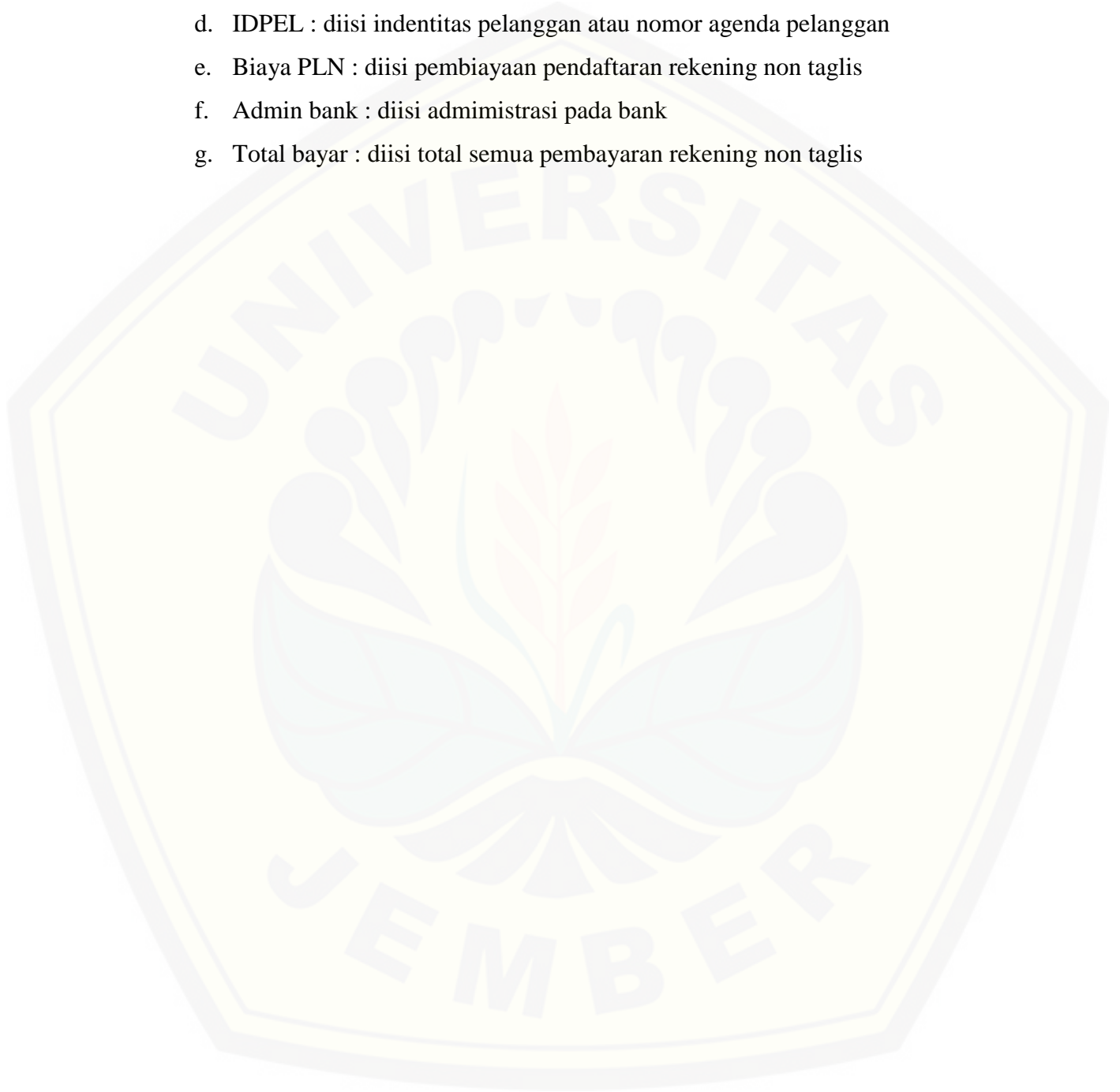
Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat : 123

185526/113814185526/forkom/AD92E529CBBE4EDB44526D3794ED57AC

Sumber data : PT. PLN (Persero) Cabang Jember, Tahun 2015

Keterangan :

- a. Transaksi : diisi dengan keterangan pembayaran apa yang dibayar
- b. No Registrasi : diisi dengan nomor rekeningnya
- c. Tanggal : diisi tanggal pembayaran tersebut
- d. IDPEL : diisi identitas pelanggan atau nomor agenda pelanggan
- e. Biaya PLN : diisi pembiayaan pendaftaran rekening non taglis
- f. Admin bank : diisi administrasi pada bank
- g. Total bayar : diisi total semua pembayaran rekening non taglis



## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Jember Kota, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Tahap-tahap prosedur pelaksanaan penagihan srekening listrik meliputi :

- a. Perencanaan penagihan, meliputi :
  1. Perencanaan kebutuhan tempat pembayaran
  2. Perencanaan kerjasama dengan pihak lain
  3. Perencanaan jadwal penagihan
- b. Persiapan penagihan rekening listrik, meliputi :
  1. Pembacaan meter
  2. Perhitungan rekening listrik
- c. Pelaksanaan penagihan rekening listrik
  1. Proses penagihan rekening listrik
  2. Pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik di tempat pembayaran dengan cara legalisasi dan giralisasi

Pelaksanaan penagihan rekening listrik kepada pelanggan PT. PLN (PERSERO) mencetak rekening listrik agar pelanggan mengetahui berapa besar biaya yang telah dipakai selama satu bulan. Setelah rekening tercetak maka PT. PLN menyerahkan atau membagi rekening listrik ke payment point yang sudah ada. Untuk mempermudah pelanggan apabila ingin membayar rekening listrik, maka PT. PLN bekerja sama dengan pihak lain diantaranya Bank, Kantor POS, loket-loket PPOB yang ada. Pembayaran rekening listrik menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN mulai tanggal 1 sampai dengan 20. Apabila pembayaran rekening listrik melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka pelanggan dikenakan biaya keterlambatan yang besarnya disesuaikan dengan daya yang digunakan pelanggan dan pelanggan akan dikenakan sanksi pemutusan

sementara. Jika dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak pelaksanaan pemutusan sementara pelanggan belum melunasi pembayaran rekening listrik ditambah dengan biaya keterlambatan maka PT. PLN berhak melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PT. PLN.





DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki .1992 .*Intermediate Accounting* .Yogyakarta : BPFE  
----- . 1994 .*Sistem Akuntansi* .Yogyakarta : BPFE  
Mulyadi.(2001). *Sistem Akuntansi.Edisi ke-3.Salemba Empat, Jakarta.*  
Mulyadi .1997 .*Sistem Akuntansi* .Yogyakarta : STIE YKPN  
Perusahaan Listrik Negara.2015.Profil Perusahaan Listrik Negara.  
[http://www.hoovers.com/company-information/cs/company  
profile.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA \(PERSERO\) PT.6dcb8be3b3f57a  
c7.html](http://www.hoovers.com/company-information/cs/company_profile.PERUSAHAAN_LISTRIK_NEGARA_(PERSERO)_PT.6dcb8be3b3f57ac7.html). 26 Februari 2105  
PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur .1995 .*Pedoman dan Petunjuk  
Langganan Tata Usaha Komputer (TUL-KOM)* . Jakarta  
PT. PLN (PRSERO) Distribusi Jawa Timur .1995 .*Pedoman dan Petunjuk  
Langganan Tata Usaha Manual (TUL-MAN)* . Jakarta  
Soemarso, S.R . 1992. *Akuntansi suatu Pengantar* .Jakarta : Rineka Cipta  
Sudarsono, F.X .1997 .*Pengantar Akuntansi II* .Jakarta : PT. Gramedia  
Undang-undang No.15 Tahun 1985.

DAFTAR HADIR

NAMA : NOVELIA KRISTIANI

NIM/PRODI : 120803102015 / D3 ADMINSTRASI KEUANGAN

BULAN : FEBRUARI - MARET

TAHLN : 2015

KET.MASUK : 07.30 – 16.00

NO	TANGGAL/BULAN	HARI	JAM MASUK	JAM PULANG	TID	PARAF	KEL
1	23 FEBRUARI	SENIN	07.30	16.00			
2	24 FEBRUARI	SILASA	07.30	16.00			
3	25 FEBRUARI	RABU	07.30	16.00			
4	26 FEBRUARI	KAMIS	07.30	16.00			
5	27 FEBRUARI	JUM'AT	07.00	16.00			
6	2 MARET	SENIN	07.30	16.00			
7	3 MARET	SILASA	07.30	16.00			
8	4 MARET	RABU	07.30	16.00			
9	5 MARET	KAMIS	07.30	16.00			
10	6 MARET	JUM'AT	07.00	16.00			
11	9 MARET	SENIN	07.30	16.00			
12	10 MARET	SILASA	07.30	16.00			
13	11 MARET	RABU	07.30	16.00			
14	12 MARET	KAMIS	07.30	16.00			
15	13 MARET	JUM'AT	07.00	16.00			
16	16 MARET	SENIN	07.30	16.00			
17	17 MARET	SILASA	07.30	16.00			
18	18 MARET	RABU	07.30	16.00			
19	19 MARET	KAMIS	07.30	16.00			
20	20 MARET	JUM'AT	07.00	16.00			
21	23 MARET	SENIN	07.30	16.00			

JEMBER, 23 MARET

MANAGER P2: PLN (PERSERO) RAYON

JEMBER KOTA

RISTINEKA SASMITA

NIPEG. 6182278J



**KARTU KONSULTASI**

**BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

Nama : Novelia Kristiani  
 NIM : 120803102015  
 Program Studi : Administrasi Keuangan  
 Judul Laporan PKN : PROSEDUR ADMINISTRASI PENERIMAAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PADA PT. PLN ( PERSERO ) UNIT. PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER

Dosen Pembimbing : Drs. Adi Prasodjo, M.P.  
 TMT\_Persetujuan : 23 Februari 2015 s/d 23 Agustus 2015  
 Perpanjangan : 23 Agustus 2015 s/d 23 Oktober 2015

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.		acc. jurnal	1.
2.	20/3/15	Revisi Jng PKN	2.
3.	21/3/15	acc Jng PKN	3.
4.			4. ....
5.			5. ....
6.			6. ....
7.			7. ....
8.			8. ....
9.			9. ....
10.			10. ....
11.			11. ....
12.			12. ....
13.			13. ....
14.			14. ....
15.			15. ....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dra. Susanti Prasetyaningtyas, M.Si.  
NIP. 19660918 199201 2 002

Jember.....  
Dosen Pembimbing

Drs. Adi Prasodjo, M.P.  
NIP. 19550516 198703 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Jember 68121

Nomor : *11081*UN25.1.4/KR/2015  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Permohonan Nilai PKN**

26 FEB 2015

Yth. Pimpinan  
PT. PLN ( PERSERO ) UNIT. PELAYANAN DAN  
JARINGAN JEMBER

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,  
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.  
IP/19661020 199002 2 001



## FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tega' Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337890 – Fax. (0331) 332150  
Jember 68121

### NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	85	Delapan puluh Lima
2.	Ketertiban	85	Delapan puluh Lima
3.	Prestasi Kerja	85	Delapan puluh Lima
4.	Kesopanan	85	Delapan puluh Lima
5.	Tanggung Jawab	85	Delapan puluh Lima

#### IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : Novelia Kristiani  
NIM : 120803102015  
Program Studi : Administrasi Keuangan

#### IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : FATHUR ROZY  
Jabatan : SUPERVISOR TRANSAKSI ENERGI  
Inststitusi : PT. PLN ( PERSERO ) UNIT. PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER

Tanda Tangan dan

Stempel Lembaga : .....

#### PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	$\geq 80$	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abonemen per bulan (Rp) : 14.800	-
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	325
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	455
4.	S-2/TR	1.300 VA	*)	708	708
5.	S-2/TR	2.200 VA	*)	760	760
6.	S-2/TR	3.500 VA s.d. 200 kVA	*)	900	900
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times P \times 735$ Blok LWBP = $P \times 735$ kVArh - 925 ***)	-

Catatan :

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :  
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :  
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok LWBP.}$   
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

\*\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1.  
 Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial P = 1,3.  
 Kategori S-3 bersifat sosial murni dan S-3 bersifat sosial komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.  
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,

  
 Susyanto

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		DRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BERAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d.450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 s.d. 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.352	1.352

Catatan :  
 \*) Diterapkan Rekening Minimum (RM);  
 $RM1 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	535
2.	B-1/TR	900 VA	25.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	630
3.	B-1/TR	1.300 VA	*)	966	965
4.	B-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.100	1.100
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.352	1.352
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.020$ Blok LWBP = 1.020 kVArh = 1.117 ***)	-

Catatan :

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung [kVA]} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung [kVA]} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$   
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

\*\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.  
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,





LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh :160 Blok II : di atas 30 kWh :395	485
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh :315 Blok II : di atas 72 kWh :405	600
3.	I-1/TR	1.300 VA	*)	930	930
4.	I-1/TR	2.200 VA	*)	960	960
5.	I-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	*)	1.112	1.112
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057****)	-
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.115$ Blok LWBP = 1.115 kVArh = 1.200 ****)	-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan LWBP = 1.191 kVArh = 1.191 ****)	-

Catatan :

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$

\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$

\*\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP}$   
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

\*\*\*\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.  
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,



*Susyanto*  
 Susyanto

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH  
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVarh (Rp/kVarh)	
1.	P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
2.	P-1/TR	900 VA	24.500	600	760
3.	P-1/TR	1.300 VA	*)	1.049	1.049
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.076	1.076
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.352	1.352
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**)	Elok WBP = $K \times 1.115$ Elok LWBP = 1.115 kVarh = 1.200 ***)	-
7.	P-3/TR	-	*)	1.352	1.352

Catatan :

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian,}$

\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP,}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

\*\*\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,

  
 Susyanto

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN TRAKSI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	T/TM	di atas 200 kVA	30.950 *)	Blok WBP = $K \times 483$ Blok LWBP = 483 kVArh = 808 **)
Catatan : *) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk: a. daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur; b. daya maksimum bulanan $\leq$ 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur. **) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus). K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.				

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN CURAH

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	C/TM	di atas 200 kVA	*)	Blok WBP dan LWBP = $Q \times 707$ kVArh = $Q \times 707$ **)

Catatan :

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok WBP dan LWBP}$$

\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Q : Faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non komersial ( $0,8 \leq Q \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

konsumen komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan kawasan perumahan.

konsumen non komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa, dan rumah susun sederhana.

Kategori konsumen komersial dan non komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ltd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN LAYANAN KHUSUS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	L/TR, TM, TT	-	-	1.650 *)

Catatan:

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Menteri ini, yaitu:

- ekspor impor, dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
- bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 2% (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
- untuk stasiun pengisian listrik umum;
- untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
- untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
- adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.

Peaksanaan penerapan tarif untuk keperluan Layanan Khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Keterangan:

- \*) Di dalam mengimplementasikan angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai maksimum  $N \leq 1,5$ .

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 Kepala Biro Hukum,



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG  
TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT  
DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

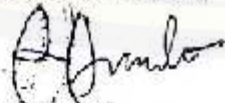
NO	BATAS DAYA	BIAYA KETERLAMBATAN (Rp/bulan)
1.	450 VA	3.000,00
2.	900 VA	3.000,00
3.	1.300 VA	5.000,00
4.	2.200 VA	10.000,00
5.	3.500 VA s.d. 5.500 VA	50.000,00
6.	6.600 VA s.d. 14.000 VA	3% (tiga persen) dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 75.000,00)
7.	di atas 14.000 VA	3% (tiga persen) dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 100.000,00)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto

Kepada Yth DRS HARTONO JL NANGKA 2 / 7 RT. 4 RW. 4 PATRANG NPWP : ... No Invoice : 516010156469-0515	Id Pelanggan Rekening Bulan Tarif / Daya Tarif / Daya Lama FKT KWh/kvarh/FKT FKT KWh/kvarh/TRT LM Jam Nyala / Tak K	516010156469 03-2015 R1 / 600 VA 70 VA 1 / 1 1 / 1 36
--	---	---

Catatan Meter	Tanggal	LWSP	WSP	TOTAL	KVARH
Sl Meter Akhir	22-02-2015	15.137.000			
Sl Awal	20-01-2015	15.105.000			
Selisih Stand (sl akhir - sl awal) (kwh)		20.000	12.000		
Pemakai KWh Total		20.000	12.000	32.000	0.000

1. Biaya Beban : Rp 18.000  
 2. Biaya Pemakaian :

	LWSP			WSP			Kvarh			TOTAL
	Pemk KWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk KWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelas Kvarh	Biaya Kvarh	Sub total	
A										
B										
C										
D										

	BLOK I			BLOK II			BLOK III			TOTAL
	Pemk KWh	Biaya Pemk	Sub total	Pemk KWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk KWh	Biaya Pemk	Sub Total	
Baru	20	275	5.500	12	445	5.340	0	495	0	10.540,00
Lama										

3. Rupiah PTL Bruto	Rp	28.540
4. Rupiah Diskon	Rp	0
5. Jumlah Rupiah PTL Netto	Rp	28.540
6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan	Rp	28.540
7. Asuransi	Rp	0
8. PPL	Rp	2.884
9. PTL 10,00 (%) x	Rp	28.540
10. PPN	Rp	0
11. Biaya Sewa Trafo/Pemakaian Trafo/Kapasitor	Rp	0
12. Malena	Rp	0
TERBILANG	JUMLAH TAGIHAN	Rp 31.724

Angka Huruf: Satu Ribu Tujuh (Ratus Dua Puluh Empat) Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar: 20 Maret 2015  
 Status : LUNAS (11)  
 Tanggal Bayar : 10/03/2015  
 Biaya Keterambatan (BK) : Rp. 0

Keterangan:  
 A = Tarif/Daya Baru TTL Baru  
 B = Tarif/Daya Lama TTL Baru  
 C = Tarif/Daya Baru TTL Lama  
 D = Tarif/Daya Lama TTL Lama



RISTU EKA SASMITA

CONTOH PENAGIHAN PIUTANG SECARA TERPUSAT

Nomor : /AGA.01.01/RYN-JBK/2015  
Srt.Sdr.No. : -,-  
Lampiran : -,-  
Sifat : Sesuai isi surat  
Perihal : Tagihan Rekening Listrik.

Kepada Yth.  
**Kepala Dinas PU CIPTA KARYA  
DAN TATA RUANG  
Pemerintah Kabupaten Jember**  
Jln. Srikoyo  
di-  
J E M B E R

Dengan hormat,  
Bersama ini terlampir kami sampaikan daftar rekening listrik PJU, Traffic Light, Penjor tagihan bulan **Maret 2015** sebesar **Rp. 3.785.220.350.- ( Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah )**, sesuai daftar terlampir.

Kami mohon agar pembayaran rekening tersebut dapat diselesaikan melalui Nomor Rekening Virtual atas nama PT PLN ( Persero ) kantor pusat di Bank BNI Jakarta cabang Melawai , rekening per Satker PEMKAB Jember adalah : **8800885160200100** selambat-lambatnya tanggal **20 Maret 2015**, bilamana pada tanggal tersebut Bapak belum menyelesaikan pembayaran rekening tersebut, maka akan kami adakan pemutusan sementara.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Manajer,,

**RISTU EKA SASMITA**

Tembusan :

- Bupati Pemerintah Kabupaten Jember
- Kepala Dispenda Kabupaten Jember
- Ka. Bag. Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember
- Arsip.



**REKAP SALDO LALU, UNIT : 51601 - JEMBER KO**

				Grand Total					
THBLLAP	UNITUP	JENIS_LAPORAN	LABEL	PLG	LBR	GABUNGAN	PAL	PPJ	PPN
201502	51601	PERGOLONGAN	10260	13.243	16.578	1.403.830.059	1.209.306.789	116.196.052	0
			10261	122	675	1.665.313.206	1.659.399.384	0	2.545.907
			10262	7	11	8.793.257	8.754.257	0	0
			10263	20	41	299.377.197	293.568.033	0	4.260.304
		PERGOLONGAN Total			13.392	17.305	3.377.313.719	3.171.028.463	116.196.052

Sumber : PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan J  
rekap saldo per kode golongan



**TA (MUTASI: 02/2015)**

MATERAI	TAGSUS	UJL	BP	TRAFO	SEWATRAFO	SEWAKAP	BK
1.734.000	2.220.722	186.014	0	0	0	0	74.186.482
1.251.000	0	2.116.915	0	0	0	0	0
39.000	0	0	0	0	0	0	0
168.000	0	1.380.860	0	0	0	0	0
3.192.000	2.220.722	3.683.789	0	0	0	0	74.186.482

aringan Jember Kota

1



# Digital Repository Universitas Jember

## REKAP SALDO LALU, UNIT : 51601 - JEMBER KOTA (MUTASI: 02/2015)

THBLLAP	UNITUP	JENIS_LAPORAN	LABEL	Grand Total													
				PLG	LBR	GABUNGAN	PAL	PPJ	PPN	MATERAI	TAGSUS	UJL	BP	TRAFO	SEWATRAFO	SEWAKAP	BK
201502	51601	PERTARIF	B-1 TR	226	299	35.289.500	29.794.969	2.979.531	0	72.000	0	0	0	0	0	0	2.443.000
			B-2 TR	17	22	30.782.947	26.221.559	2.495.279	0	93.000	0	0	0	0	0	0	1.973.109
			I-3 TM	1	2	35.020.518	31.257.600	937.728	0	12.000	0	0	0	0	0	0	2.813.190
			P-1 TR	94	430	1.839.203.312	1.834.171.354	0	0	1.197.000	0	3.497.775	0	0	0	0	337.183
			R-1 TR	12.689	16.048	1.279.335.116	1.105.995.455	107.246.550	0	1.521.000	2.220.722	139.389	0	0	0	0	62.212.000
			R-2 TR	38	50	31.721.590	26.309.001	2.536.964	0	129.000	0	46.625	0	0	0	0	2.700.000
			R-3 TM	4	11	74.934.320	68.062.109	0	6.806.211	66.000	0	0	0	0	0	0	0
			S-2 TR	323	443	51.026.416	49.216.416	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	1.708.000
		PERTARIF Total	13.392	17.305	3.377.313.719	3.171.028.463	116.196.052	6.806.211	3.192.000	2.220.722	3.683.789	0	0	0	0	74.186.482	

Sumber : PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember Kota  
rekap saldo per kode golongan

**REKAP SALDO LALU, UNIT : 51601 - JEMBER KO**

				Grand Total					
THBLLAP	UNITUP	JENIS_LAPORAN	LABEL	PLG	LBR	GABUNGAN	PAL	PPJ	PPN
201502	51601	PERGOLONGAN	10260	13.243	16.578	1.403.830.059	1.209.306.789	116.196.052	0
			10261	122	675	1.665.313.206	1.659.399.384	0	2.545.907
			10262	7	11	8.793.257	8.754.257	0	0
			10263	20	41	299.377.197	293.568.033	0	4.260.304
		PERGOLONGAN Total			13.392	17.305	3.377.313.719	3.171.028.463	116.196.052

Sumber : PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan J  
rekap saldo per kode golongan



**TA (MUTASI: 02/2015)**

MATERAI	TAGSUS	UJL	BP	TRAFO	SEWATRAFO	SEWAKAP	BK
1.734.000	2.220.722	186.014	0	0	0	0	74.186.482
1.251.000	0	2.116.915	0	0	0	0	0
39.000	0	0	0	0	0	0	0
168.000	0	1.380.860	0	0	0	0	0
3.192.000	2.220.722	3.683.789	0	0	0	0	74.186.482

aringan Jember Kota

1



# Digital Repository Universitas Jember

## REKAP SALDO LALU, UNIT : 51601 - JEMBER KOTA (MUTASI: 02/2015)

THBLLAP	UNITUP	JENIS_LAPORAN	LABEL	Grand Total													
				PLG	LBR	GABUNGAN	PAL	PPJ	PPN	MATERAI	TAGSUS	UJL	BP	TRAFO	SEWATRAFO	SEWAKAP	BK
201502	51601	PERTARIF	B-1 TR	226	299	35.289.500	29.794.969	2.979.531	0	72.000	0	0	0	0	0	0	2.443.000
			B-2 TR	17	22	30.782.947	26.221.559	2.495.279	0	93.000	0	0	0	0	0	0	1.973.109
			I-3 TM	1	2	35.020.518	31.257.600	937.728	0	12.000	0	0	0	0	0	0	2.813.190
			P-1 TR	94	430	1.839.203.312	1.834.171.354	0	0	1.197.000	0	3.497.775	0	0	0	0	337.183
			R-1 TR	12.689	16.048	1.279.335.116	1.105.995.455	107.246.550	0	1.521.000	2.220.722	139.389	0	0	0	0	62.212.000
			R-2 TR	38	50	31.721.590	26.309.001	2.536.964	0	129.000	0	46.625	0	0	0	0	2.700.000
			R-3 TM	4	11	74.934.320	68.062.109	0	6.806.211	66.000	0	0	0	0	0	0	0
			S-2 TR	323	443	51.026.416	49.216.416	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	1.708.000
		PERTARIF Total	13.392	17.305	3.377.313.719	3.171.028.463	116.196.052	6.806.211	3.192.000	2.220.722	3.683.789	0	0	0	0	74.186.482	

Sumber : PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Jember Kota  
rekap saldo per kode golongan